



PEMERINTAH KOTA BONTANG

KESEPAKATAN

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BONTANG, AGUSTUS 2025



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
1.1.1. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia.....	5
1.1.2. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur.....	21
1.1.3. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bontang.....	32
1.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	46
1.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Nasional.....	47
1.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalimantan Timur.....	48
1.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Kota Bontang.....	50
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	52
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	52
3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025.....	52
3.1.2. Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2024.....	54
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	56
3.2.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Bontang Tahun 2024.....	56
3.2.2. Kebijakan Makro Fiskal Kota Bontang Tahun 2024.....	57



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

BAB IV KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	60
1.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksi untuk Tahun 2025.....	60
1.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	60
4.1.1. Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah.....	60
4.1.2. Perubahan Target Pendapatan Transfer.....	61
4.1.3. Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	62
BAB V KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH.....	64
5.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah	64
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	64
5.1.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi.....	64
5.1.2. Rencana Perubahan Belanja Modal.....	65
5.1.3. Rencana Perubahan Belanja Tidak Terduga.....	65
BAB VI KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	68
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	69
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	69
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN PERUBAHAN	71
7.1. Strategi Pencapaian Perubahan Pendapatan Daerah	71
7.2. Strategi Pencapaian Perubahan Belanja Daerah	72
7.3. Strategi Pencapaian Perubahan Pembiayaan Daerah	74
BAB VIII P E N U T U P	75



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pulau (persen)	9
Tabel 2.2	IHK dan Tingkat Inflasi Month-to-Month (M-to-M), Year-to-Date (Y-to-D), dan Year-on-Year (Y-on-Y) Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2025	13
Tabel 2.3	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2024	17
Tabel 2.4	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin, Maret 2024 dan September 2024	18
Tabel 2.5	Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025	20
Tabel 2.6	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi di Kaltim Per Okt-Des Tahun 2024	25
Tabel 2.7	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kaltim Periode Okt-Des Tahun 2024	26
Tabel 2.8	Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Mei 2025 Kabupaten/Kota di Prov. Kaltim	28
Tabel 2.9	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin, Maret 2023-September 2024	29
Tabel 2.10	Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur	30
Tabel 2.11	Sasaran Ekonomi Makro Daerah	31
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontang tahun 2020-2024	34
Tabel 2.13	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontang Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.14	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bontang Tahun 2019-2024	36
Tabel 2.15	Nilai Investasi PMDN Prov. Kaltim dan 10 Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023	38
Tabel 2.16	Nilai Investasi PMA Prov. Kaltim dan 10 Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023	39
Tabel 2.17	Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kota dalam Angka Kemiskinan Bontang Triwulan I Tahun 2025	43
Tabel 2.18	Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kota Bontang Triwulan I Tahun 2025	45
Tabel 2.19	Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026	49



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023 – 2025	54
Tabel 3.2 Postur Makro Fiskal, 2023 – 2025 (dalam % PDB)	55
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kota Bontang Triwulan I.....	56
Tabel 3.4. Kebijakan Makro Fiskal Kota Bontang Tahun 2025 (dalam milyar rupiah)	59
Tabel 4.1 Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025	60
Tabel 4.2 Perubahan PAD Kota Bontang Tahun 2025	60
Tabel 4.3 Perubahan Pendapatan Transfer Kota Bontang Tahun 2025	61
Tabel 4.4 Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bontang yang Ditarget Pada Tahun 2025	62
Tabel 4.5 Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023-2025 (dalam rupiah)	63
Tabel 5.1 Perubahan Belanja Daerah Kota Bontang yang Ditarget Pada Tahun 2025.....	64
Tabel 5.2. Perubahan Belanja Operasi Kota Bontang Tahun 2025	64
Tabel 5.3. Perubahan Belanja Modal Kota Tahun 2025	65
Tabel 5.4. Perubahan Belanja Tidak Terduga Kota Bontang Tahun 2025	65
Tabel 5.5. Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2023-2025 (dalam rupiah)	67
Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Tahun 2025 (dalam rupiah).....	68
Tabel 6.2. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kota Bontang Tahun 2025 (dalam rupiah).....	69
Tabel 6.3 Realisasi, Proyeksi, dan Penetapan Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2023-2025 (dalam rupiah)	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025 (Triwulan)	5
Gambar 2.2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025	6
Gambar 2.3 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025	7
Gambar 2.4 Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025	7
Gambar 2.5 Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025	8
Gambar 2.6 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I-2025	9
Gambar 2.7 Capaian Realisasi Investasi: Triwulan I 2025	10
Gambar 2.8 Perkembangan Realisasi Investasi: 2021 – Maret 2025	11
Gambar 9 Inflasi (Y-on-Y) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, Juni 2025	12
Gambar 2.10 Indeks Harga Produsen (2016=100) Menurut Sektor, TW I-2022– TW I-2025	15
Gambar 2.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2013–September 2024	16
Gambar 2.12 Angka Stunting Indonesia 2018–2024	18
Gambar 2.13 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kaltim (% , y-on-y)	22
Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025	23
Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Kalimantan Timur (q- to-q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I- 2025	24
Gambar 2.16 Andil inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) menurut keompok pengeluaran Tingkat inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) Prov. Kaltim (2022-100), Mei 2024-Mei 2025	27
Gambar 2.17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2016–September 2024	29
Gambar 2.18 Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 berdasarkan Hasil Survei SSGI	31
Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2017-2024	34
Gambar 2.20 Grafik Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kota Bontang berdasarkan harga Konstan Tahun 2020-2024	37
Gambar 21 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Bontang Tahun 2020 - 2024 (dalam Miliar Rupiah)	38



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Gambar 2.22 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Kota Bontang Tahun 2020-2024	39
Gambar 2.23 Jumlah Proyek Investasi PMDN dan PMA di Kota Bontang Tahun 2020-2024	40
Gambar 2.24 Tingkat Inflasi year on year Kota Bontang Bulan Desember 2024	42
Gambar 2.25 Tingkat prevalansi stunting Kota Bontang 2020-2024	43
Gambar 2.26 Prevalensi Status Gizi (TB/U) pada Balita Prov. Kaltim Menurut Kab/Kota.....	44
Gambar 2.27 Outlook APBN 2025.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA APBD

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang dapat berupa:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 juga disusun berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi dan sekaligus terkait kebijakan nasional, perintah dari peraturan perundang-undangan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang secara integral sejalan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2021-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan dilantikannya Ibu dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG sebagai Wali Kota dan Bapak Agus Haris, SH sebagai Wakil Wali Kota, maka perumusan penyusunan perubahan KUA TA2025 selaras dengan perubahan RKPD Tahun 2025 dan perlu



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2025.

Selain dengan penyeselarasan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, penyusunan perubahan KUA juga dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA. 2025. Hasil efisiensi nantinya akan berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan Kebijakan Umum APBD memiliki sistematika penjabaran yang relatif sama dengan KUA, yaitu: memuat target pencapaian kinerja secara terukur dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai juga dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika dan kebutuhan terkini, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan.
- 2) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bontang dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Penyusunan RKA-SKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 yang secara bersamaan setelah melalui mekanisme pembahasan akan dituangkan dalam Dokumen Nota Kesepakatan.
- 3) Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan KUA Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 543);
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Bontang Nomor 69;
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tahun Anggaran 2025; dan
21. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2025 Nomor 18).



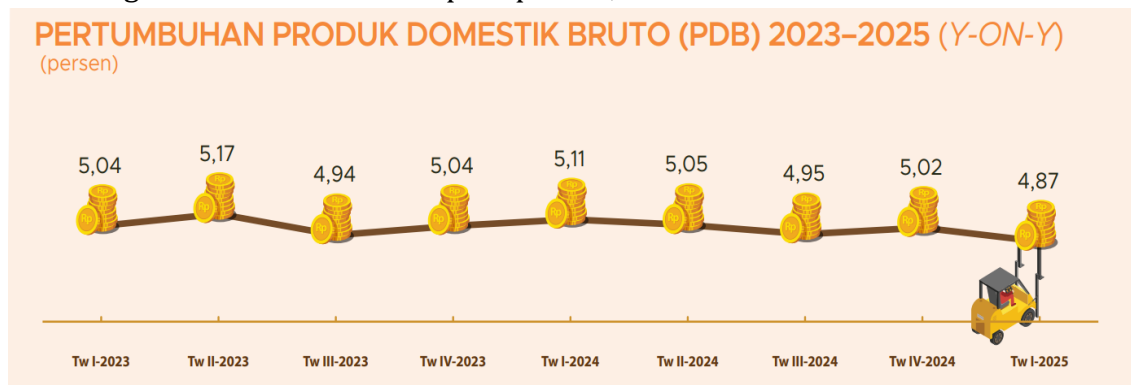
BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun



Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025 (Triwulan)

(Sumber: BRS, BPS-Pertumbuhan ekonomi Indonesia -Mei 2025)

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen. Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen (*y-on-y*).

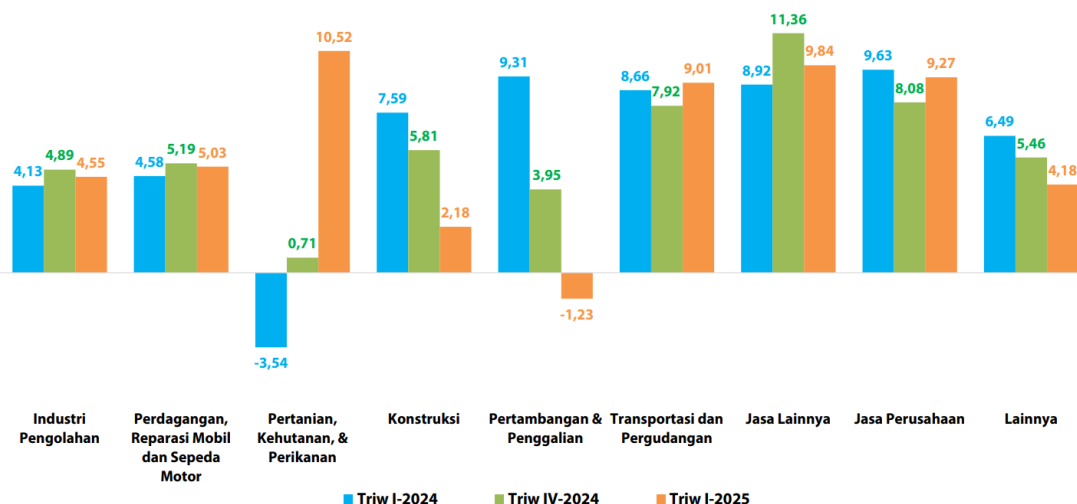
Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen.



Gambar 2.2 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

(Sumber: BRS, BPS-Pertumbuhan ekonomi Indonesia -Mei 2025)

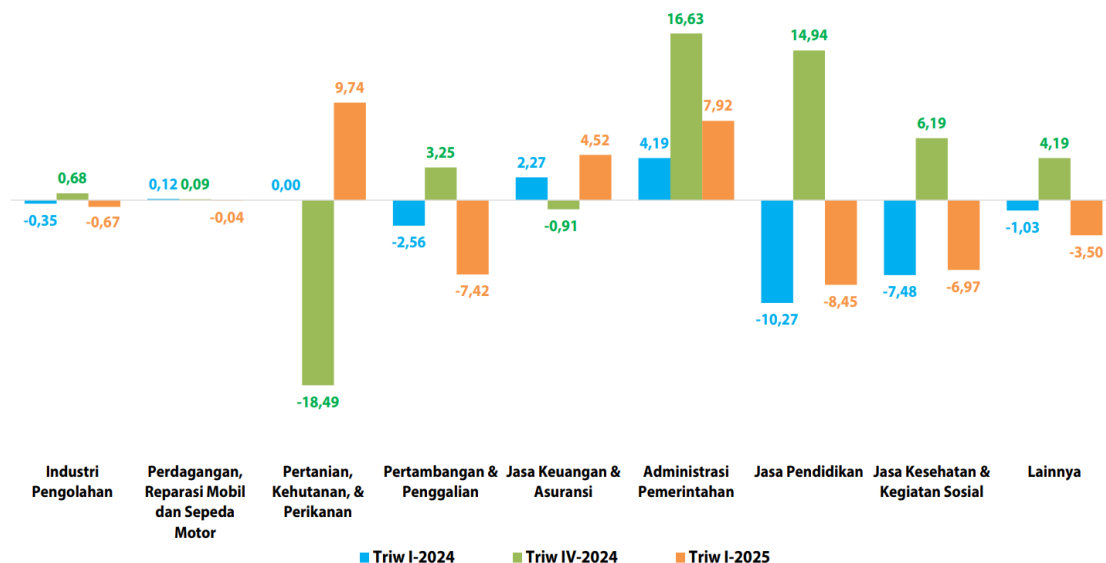
Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,22 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,66 persen; Konstruksi sebesar 9,84 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,99 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,96 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (*q-to-q*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi terdalam terjadi pada Jasa Pendidikan sebesar 8,45 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,42 persen; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,97 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,74 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,92 persen; serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,52 persen.



PERUBAHAN

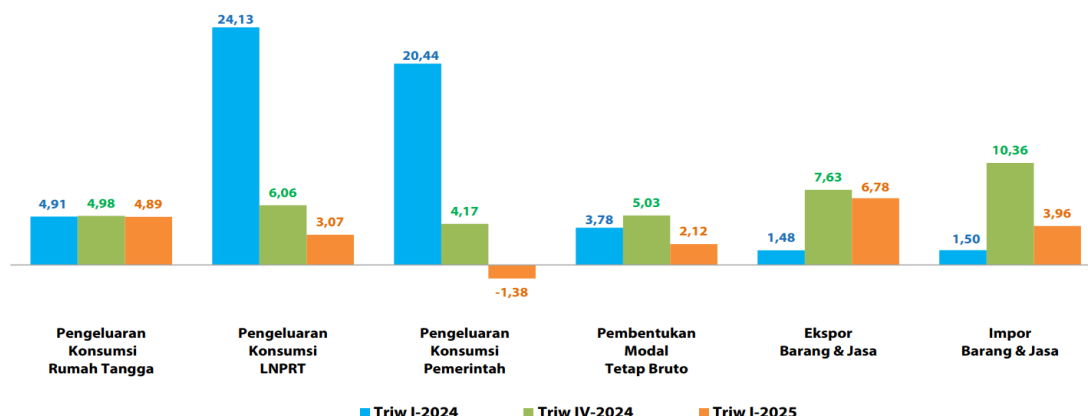
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025



Gambar 2.3 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

(Sumber: BRS, BPS-Mei 2025)

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,87 persen (y-on-y). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang berkontraksi sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,78 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,89 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,07 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,12 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) juga tumbuh sebesar 3,96 persen.



Gambar 2.4 Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

(Sumber: BRS, BPS-Pertumbuhan ekonomi Indonesia -Mei 2025)

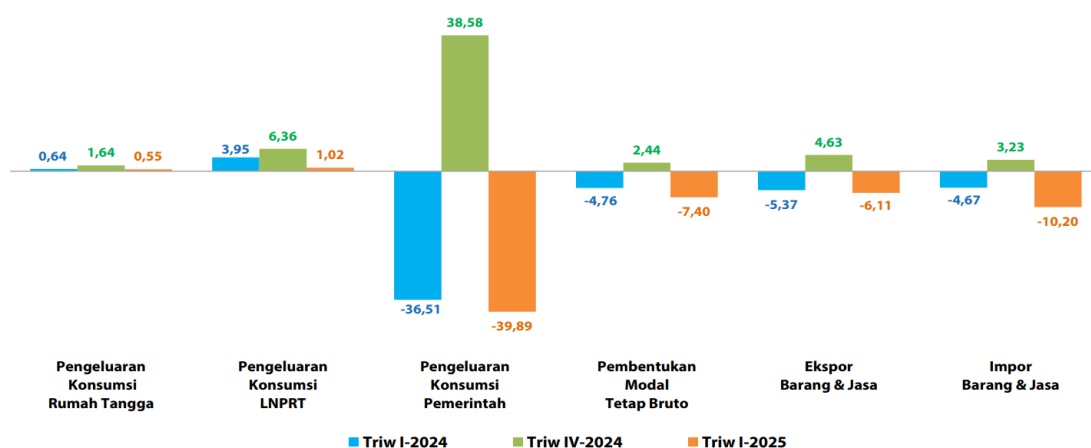


PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 54,53 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 28,03 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,30 persen; Komponen PK-P sebesar 5,88 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 3,09 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,39 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB Pengeluaran memiliki peran sebesar 19,74 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (*q-to-q*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen, kecuali Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 1,02 persen dan Komponen PK-RT yang tumbuh sebesar 0,55 persen. Sementara itu, kontraksi terdalam terjadi pada Komponen PK-P sebesar 39,89 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 7,40 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,11 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang juga berkontraksi sebesar 10,20 persen.



Gambar 2.5 Pertumbuhan PDB Beberapa Komponen Pengeluaran (Q-to-Q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

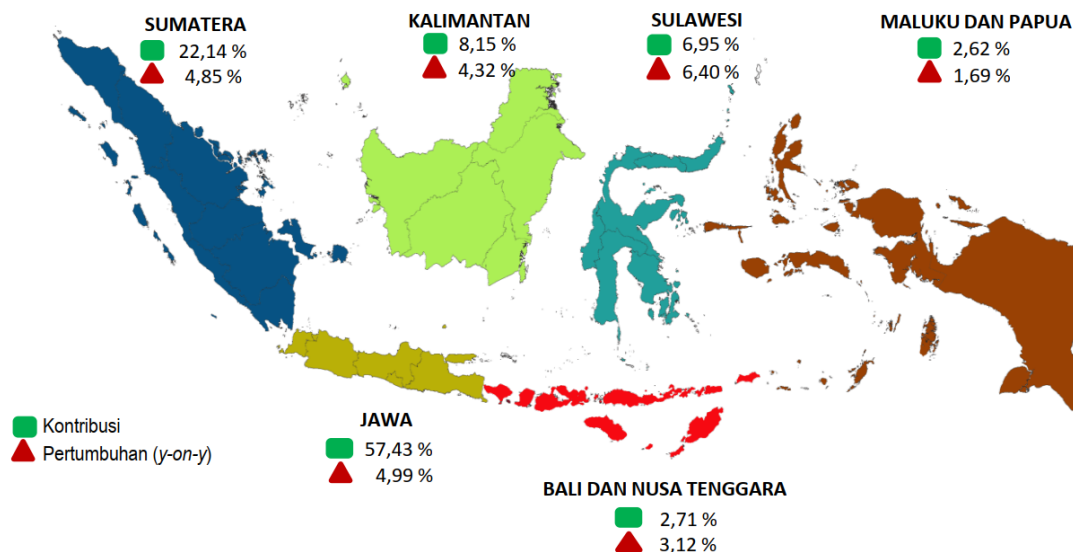
(Sumber: BRS, BPS-Mei 2025)

Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menguasai struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama triwulan I-2025 dengan kontribusi sebesar 57,43 persen; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,14 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,95 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,71 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,62 persen.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025



Gambar 2.6 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I-2025

(Sumber: BRS, BPS-Pertumbuhan ekonomi Indonesia -Mei 2025)

Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi secara spasial di beberapa kelompok provinsi tercatat mengalami penguatan. Kelompok provinsi yang mencatat penguatan pertumbuhan (y-on-y) adalah Pulau Sulawesi yang tumbuh sebesar 6,40 persen, tertinggi di Indonesia; diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 4,99 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,85 persen. Sementara itu, kelompok provinsi di Pulau Kalimantan mencatat pertumbuhan sebesar 4,32 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,12 persen; serta kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 1,69 persen.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pulau (persen)

Pulau	Triw I-2025 terhadap Triw IV-2024 (Q-to-Q) ¹	Triw I-2025 terhadap Triw I-2024 (Y-on-Y) ²	Sumber Pertumbuhan Triw I-2025 (Y-on-Y) ²
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sumatera	-1,34	4,85	1,00
2. Jawa	0,87	4,99	2,95
3. Bali dan Nusa Tenggara	-3,83	3,12	0,08
4. Kalimantan	-2,75	4,32	0,36
5. Sulawesi	-5,18	6,40	0,42
6. Maluku dan Papua	-5,71	1,69	0,05

Catatan: ¹Q-to-Q : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

²Y-on-Y : PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

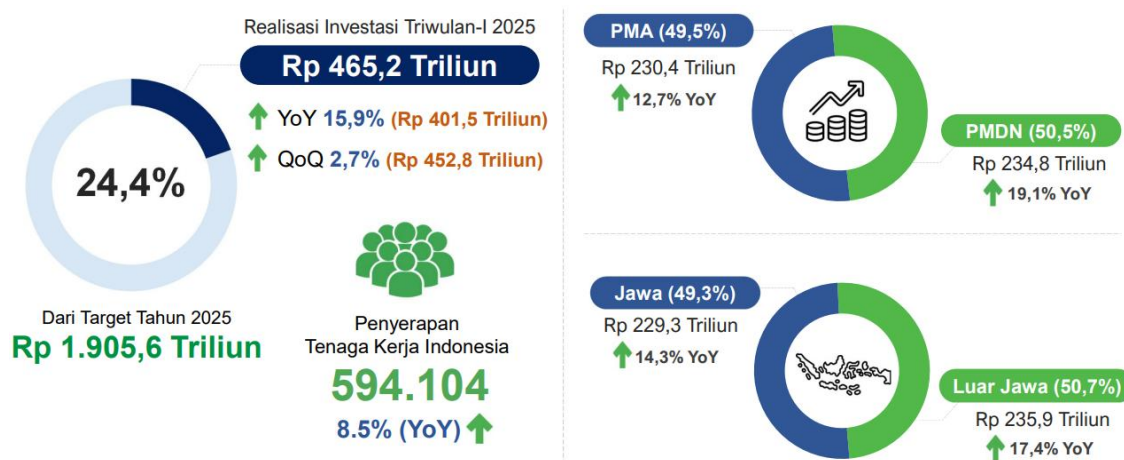
(Sumber: BRS, BPS-Pertumbuhan ekonomi Indonesia -Mei 2025)



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Realisasi investasi di Indonesia pada kuartal pertama (Q1) 2025 telah mencapai Rp465,2 triliun, tumbuh 15,9% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Capaian ini sejalan dengan target realisasi investasi 2025 yang ditetapkan sebesar Rp1.905 triliun. Pertumbuhan realisasi investasi menunjukkan Indonesia masih cukup menarik bagi investor, di tengah berbagai dinamika geopolitik. Penanaman Modal Asing (PMA) masih mendominasi realisasi investasi pada Q1 2025, dengan kontribusi sebesar Rp230,4 triliun atau setara 49,5%. Sisanya sebanyak Rp234,8 triliun berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investor kini lebih dominan berinvestasi di luar pulau Jawa, dengan total realisasi investasi Rp235,9 triliun atau setara 50,7%. Sementara realisasi investasi di pulau Jawa mencapai Rp229,3 triliun atau setara 49,3%.



Gambar 2.7 Capaian Realisasi Investasi: Triwulan I 2025

(Sumber: Press Release, BKPM-Apr 2025)

Realisasi investasi di Indonesia menunjukkan tren positif yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga triwulan pertama tahun 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia serta efektivitas berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung iklim investasi. Tahun 2021 Realisasi investasi mencapai Rp 901,0 triliun, tumbuh 8,9% dibandingkan tahun 2020. Kenaikan ini didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan insentif fiskal dari pemerintah. Tahun 2022 Investasi semakin menguat dengan realisasi Rp 1.207,2 triliun, meningkat 34,0% dari tahun sebelumnya. Sektor infrastruktur dan manufaktur menjadi penyumbang utama, didukung oleh percepatan proyek strategis nasional. Untuk di tahun 2023, Capaian investasi kembali memecahkan rekor sebesar Rp 1.418,9 triliun, tumbuh 17,5% dari 2022. Ekspansi industri hijau dan digital turut mendorong pertumbuhan ini. Pertumbuhan investasi terus meningkat hingga di tahun 2024 Realisasi investasi terus melambung hingga Rp 1.650,3 triliun, dengan pertumbuhan 16,3%. Investasi asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) berkontribusi seimbang, mencerminkan optimisme pasar. riwulan I 2025 (Januari – Maret) Pada periode ini, realisasi investasi telah mencapai Rp 450,8 triliun, atau 20% dari target tahunan. Proyeksi menunjukkan potensi pertumbuhan

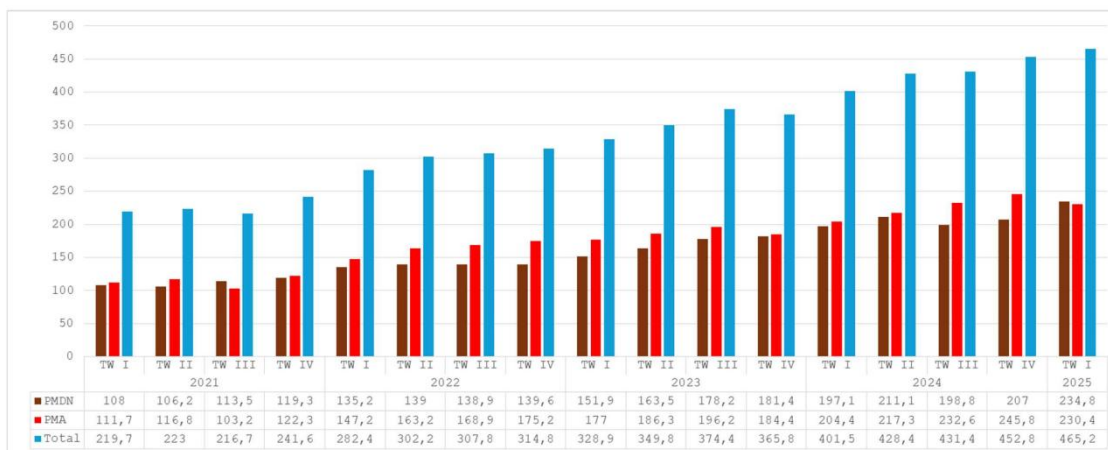


PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

di atas 15% secara year-on-year (yoy), didukung oleh ekspansi sektor energi terbarukan dan kawasan industri.

Faktor pendukung pertumbuhan investasi ini didukung oleh kebijakan pemerintah seperti UU Cipta Kerja, insentif pajak, dan kemudahan perizinan. Pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan daya saing. Diversifikasi sektor unggulan, termasuk hilirisasi industri, digitalisasi, dan ekonomi hijau juga memicu pertumbuhan investasi di Indonesia. Prospek ke depan dengan momentum pertumbuhan yang stabil, realisasi investasi tahun 2025 diprediksi akan menembus Rp 1,8 triliun–Rp 2 triliun, memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi utama di kawasan Asia Tenggara. Realisasi investasi di Indonesia, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), menunjukkan pertumbuhan yang merata di seluruh provinsi.



Gambar 2.8 Perkembangan Realisasi Investasi: 2021 – Maret 2025

(Sumber: Press Release, BKPM-Apr 2025)

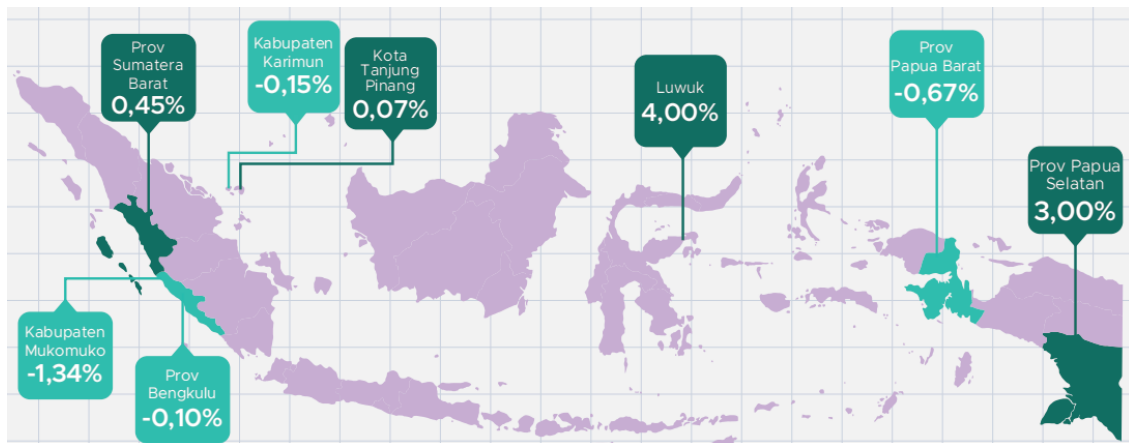
Dalam cakupan ekonomi makro salah satu acuan yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan sebuah fenomena moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Pemeliharaan stabilitas harga terus menjadi tujuan utama dari kebijakan makro ekonomi untuk sebagian. Pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan, yaitu: inflasi di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu: tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Juni 2025 terjadi inflasi *year-on-year* (*y-on-y*) sebesar 1,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,27. Inflasi provinsi *y-on-y* tertinggi terjadi di Provinsi Papua Selatan sebesar 3,00 persen dengan IHK sebesar 111,03 dan terendah terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,45 persen dengan IHK sebesar 108,41. Sedangkan deflasi provinsi *y-on-y* terdalam terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,67 persen dengan IHK sebesar 107,22 dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,10 persen dengan IHK sebesar 106,61. Sementara inflasi kabupaten/kota *y-on-y* tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 4,00 persen dengan IHK sebesar 112,25 dan terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 105,60. Sedangkan deflasi kabupaten/kota *y-on-y* terdalam terjadi di Kabupaten Mukomuko sebesar 1,34 persen dengan IHK sebesar 105,61 dan terendah terjadi di Kabupaten Karimun sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 105,92.



Gambar 9 Inflasi (Y-on-Y) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah, Juni 2025

(Sumber: BRS, BPS-Perkembangan IHK Indonesia -Juni 2025)

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya Sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,99 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,01 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,59 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,57 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,84 persen; kelompok transportasi sebesar 0,15 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,23 persen; kelompok Pendidikan sebesar 1,82 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,95 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,30 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen. Tingkat inflasi *month-to-month* (*m-to-m*) Juni 2025 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi *year-to-date* (*y-to-d*) Juni 2025 sebesar 1,38 persen. Tingkat inflasi *y-on-y* komponen inti Juni 2025 sebesar 2,37 persen; inflasi *m-to-m* sebesar 0,07 persen; dan inflasi *y-to-d* sebesar 1,24 persen.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel 2.2 IHK dan Tingkat Inflasi Month-to-Month (M-to-M), Year-to-Date (Y-to-D), dan Year-on-Year (Y-on-Y) Nasional Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Juni 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2024	IHK Desember 2024	IHK Juni 2025	Tingkat Inflasi M-to-M Juni 2025 ¹ (%)	Tingkat Inflasi Y-to-D Juni 2025 ² (%)	Tingkat Inflasi Y-on-Y Juni 2025 ³ (%)	Andil Inflasi M-to-M Juni 2025 (%)	Andil Inflasi Y-on-Y Juni 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	106,28	106,80	108,27	0,19	1,38	1,87	0,19	1,87
Makanan, Minuman dan Tembakau	110,30	110,41	112,50	0,46	1,89	1,99	0,13	0,58
Pakaian dan Alas Kaki	102,96	103,38	104,00	0,05	0,60	1,01	~0	0,05
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,35	102,60	103,98	0,09	1,35	1,59	0,02	0,25
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,47	103,87	104,06	-0,01	0,18	0,57	~0	0,03
Kesehatan	103,77	104,64	105,68	0,09	0,99	1,84	~0	0,05
Transportasi	109,81	109,48	109,97	0,07	0,45	0,15	0,01	0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,56	99,48	99,29	-0,01	-0,19	-0,27	~0	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	103,68	104,26	104,96	0,09	0,67	1,23	~0	0,02
Pendidikan	103,15	104,92	105,03	-0,05	0,10	1,82	~0	0,10
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	105,59	106,64	107,65	0,07	0,95	1,95	0,01	0,20
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	109,80	113,22	120,01	0,33	6,00	9,30	0,02	0,59

(Sumber: BRS, BPS- Perkembangan IHK Indonesia -Juni 2025)

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Juni 2025, antara lain: beras, ikan segar, kopi bubuk, minyak goreng, kelapa, tomat, santan jadi, sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, upah asisten rumah tangga, tarif air minum PAM, mobil, sepeda motor, uang sekolah SD, uang kuliah akademi/PT, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, daun bawang, telur ayam ras, kentang, kol putih/kubis, cabai hijau, wortel, jeruk, susu bubuk untuk balita, sabun detergen bubuk, sabun cair/cuci piring, bensin, tarif kereta api, tarif angkutan laut, tarif angkutan udara, dan telepon seluler.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada Juni 2025, antara lain: beras, cabai rawit, bawang merah, tomat, telur ayam ras, daging ayam ras, kacang panjang, buncis, sawi putih/pecay/pitsai, sigaret kretek mesin (SKM), bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-*



m, antara lain: cabai merah, bawang putih, bensin, tarif kereta api, tarif angkutan laut, dan uang sekolah SMA.

Pada Juni 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,58 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok transportasi sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,20 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,59 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen.

Indeks Harga Produsen (IHP) umum sembilan sektor pada triwulan I-2025 sebesar 134,89 (lihat Tabel 1). IHP umum sembilan sektor tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,36 persen dibandingkan IHP umum sembilan sektor pada triwulan IV-2024 (*q-to-q*) yang sebesar 133,08. Kenaikan IHP umum sembilan sektor ini disebabkan oleh kenaikan di seluruh sektor, kecuali Sektor Pengangkutan turun sebesar 0,36 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 3,41 persen; dan Sektor Jasa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,01 persen.

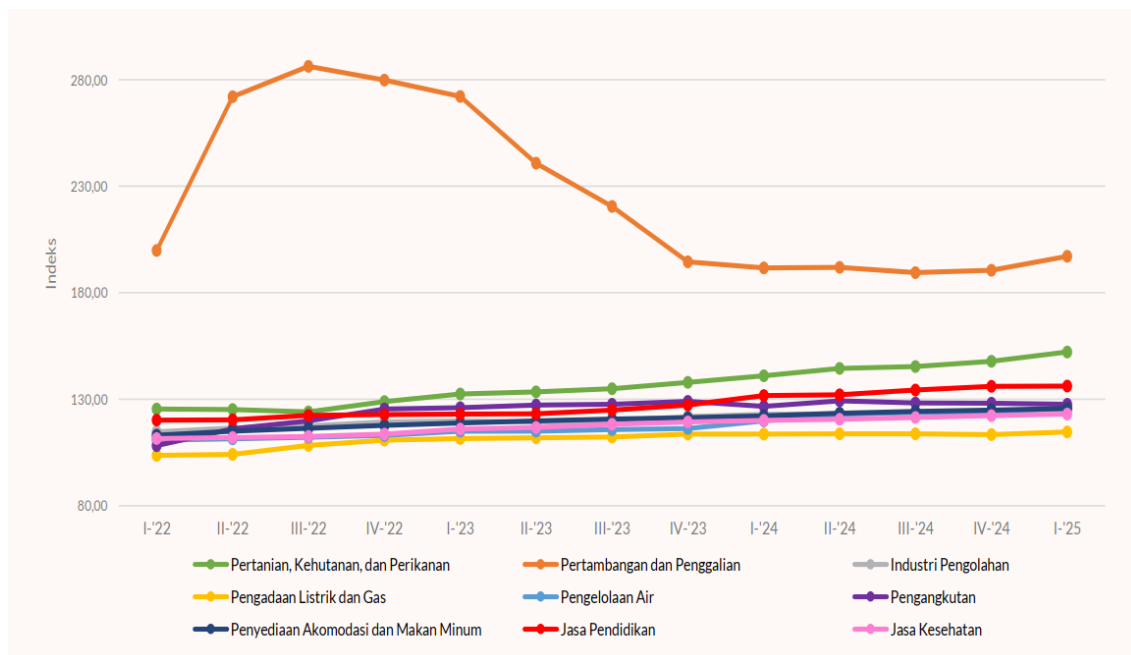
IHP Sektor Industri Pengolahan triwulan I-2025 sebesar 125,56; naik 1,04 persen dibandingkan dengan IHP triwulan IV-2024 (*q-to-q*) sebesar 124,27. IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas triwulan I-2025 sebesar 114,65; naik 1,08 persen dibandingkan dengan IHP triwulan IV-2024 (*q-to-q*) sebesar 113,43. Adapun IHP Sektor Pengelolaan Air triwulan I-2025 sebesar 125,79; naik 1,38 persen dibandingkan IHP triwulan IV-2024 (*q-to-q*) yang sebesar 124,08. IHP Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum triwulan I-2025 sebesar 125,67; naik 0,56 persen dibandingkan IHP triwulan IV-2024 (*q-to-q*) yang sebesar 124,97. IHP Sektor Jasa Pendidikan triwulan I-2025 sebesar 136,18; naik 0,13 persen dibandingkan dengan IHP triwulan IV-2024 (*q-to-q*) yang sebesar 136,01. IHP Sektor Jasa Kesehatan triwulan I-2025 sebesar 123,07; naik 0,66 persen dibandingkan dengan IHP triwulan IV-2024 (*q-to-q*) yang sebesar 122,26.

Perubahan IHP umum sembilan sektor (*y-on-y*) triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 sebesar 2,77 persen, yaitu dari 131,25 pada triwulan I-2024 menjadi 134,89 pada triwulan I-2025. Kenaikan indeks tersebut disebabkan oleh kenaikan seluruh sektor. Dari seluruh sektor yang mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,94 persen, diikuti Sektor Pengelolaan Air sebesar 5,02 persen, dan Sektor Jasa Pendidikan sebesar 3,35 persen.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025



Gambar 2.10 Indeks Harga Produsen (2016=100) Menurut Sektor, TW I-2022– TW I-2025

(Sumber: BRS, BPS- Perkembangan IHP Indonesia-Juni 2025)

IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian (*y-on-y*) triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami kenaikan sebesar 2,83 persen, yaitu dari 191,67 pada triwulan I-2024 menjadi 197,10 pada triwulan I-2025. IHP Sektor Industri Pengolahan (*y-on-y*) triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami kenaikan sebesar 2,16 persen, yaitu dari 122,91 pada triwulan I-2024 menjadi 125,56 pada triwulan I-2025. IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (*y-on-y*) triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami kenaikan sebesar 0,91 persen, yaitu dari 113,62 pada triwulan I-2024 menjadi 114,65 pada triwulan I-2025. IHP Sektor Pengangkutan (*y-on-y*) triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami kenaikan sebesar 0,77 persen, yaitu dari 126,70 pada triwulan I-2024 menjadi 127,67 pada triwulan I-2025. IHP Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (*y-on-y*) triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami kenaikan sebesar 2,84 persen, yaitu dari 122,20 pada triwulan I-2024 menjadi 125,67 pada triwulan I-2025. Adapun IHP Sektor Jasa Kesehatan (*y-on-y*) mengalami kenaikan sebesar 2,51 persen, dari 120,06 pada triwulan I-2024 menjadi 123,07 pada triwulan I-2025.

Berubahnya tingkat inflasi akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi/rendah. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Tingkat kemiskinan akan menjadi lebih ekstrem jika mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia yang cenderung menurun. Pengurangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu komitmen Indonesia yang tertuang di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan

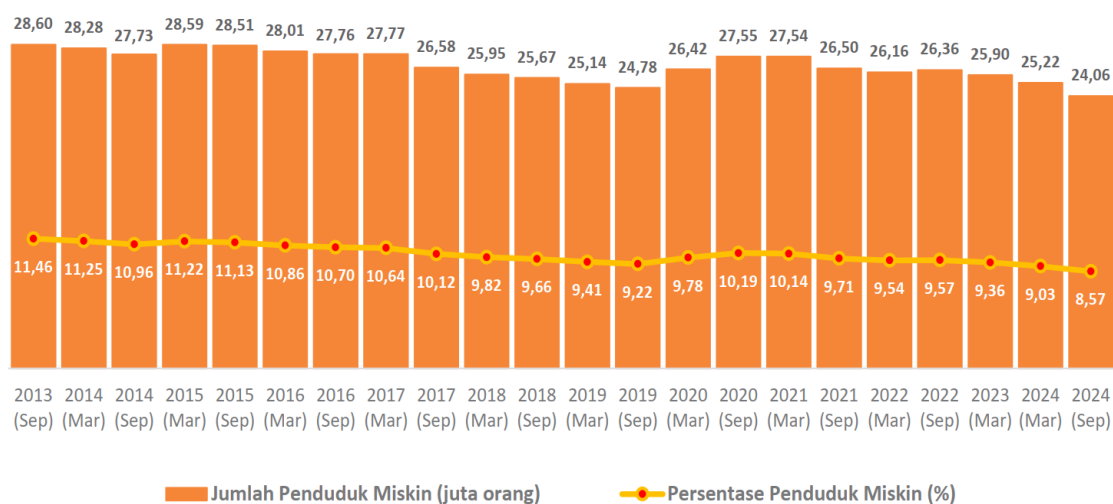


PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Ekstrem dan juga *Sustainable Development Goals*/SDGs yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030.

Garis Kemiskinan Nasional (BPS Projection) Diprediksi berada di kisaran Rp550.000 - Rp600.000/kapita/bulan (naik dari Rp535.547 di Maret 2024 akibat inflasi) sedangkan Garis kemiskinan ekstrem sebesar Rp366.270/bulan (\$2.15 PPP/hari). Pada target RPJMN jumlah penduduk miskin ditargetkan 6,5 – 7% dari total populasi. BAPPENAS mengestimasi 18-19 Juta orang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,1-5,3%, scenario tanpa gejolak ekonomi global yang besar dan Efektivitas program "Indonesia bebas kemiskinan ekstrem 2030". Hal itu semua akan ditentukan oleh harga komoditas pangan, penyerapan tenaga kerja pasca-pemilu dan Efektifitas program bantuan sosial.



Gambar 2.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2013–September 2024

(Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia Sept 2024, BPS)

Secara umum, pada periode September 2013–September 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 1,16 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,84 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

2024 tercatat sebesar 8,57 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024–September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,59 juta orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,57 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,09 persen menjadi 6,66 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 11,79 persen menjadi 11,34 persen.

Tabel 2.3 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2024

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	6,98	9,65	8,42	2,00	3,25	5,25
Jawa	6,81	10,89	8,05	7,43	5,19	12,62
Bali dan Nusa Tenggara	7,35	16,80	12,15	0,58	1,36	1,94
Kalimantan	4,40	6,23	5,30	0,38	0,53	0,91
Sulawesi	5,57	11,85	9,12	0,50	1,38	1,88
Maluku dan Papua	5,95	25,43	18,62	0,16	1,30	1,46
Indonesia	6,66	11,34	8,57	11,05	13,01	24,06

(Sumber: *Profil Kemiskinan di Indonesia Sept 2024, BPS*)

Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 18,62 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,30 persen. Namun demikian, dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (12,62 juta orang) sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,91 juta orang).

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp595.242,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,11 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 8,14 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2024 di perkotaan sebesar 73,59 persen dan di perdesaan sebesar 75,97 persen.

Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin pada September 2024 adalah sebesar



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

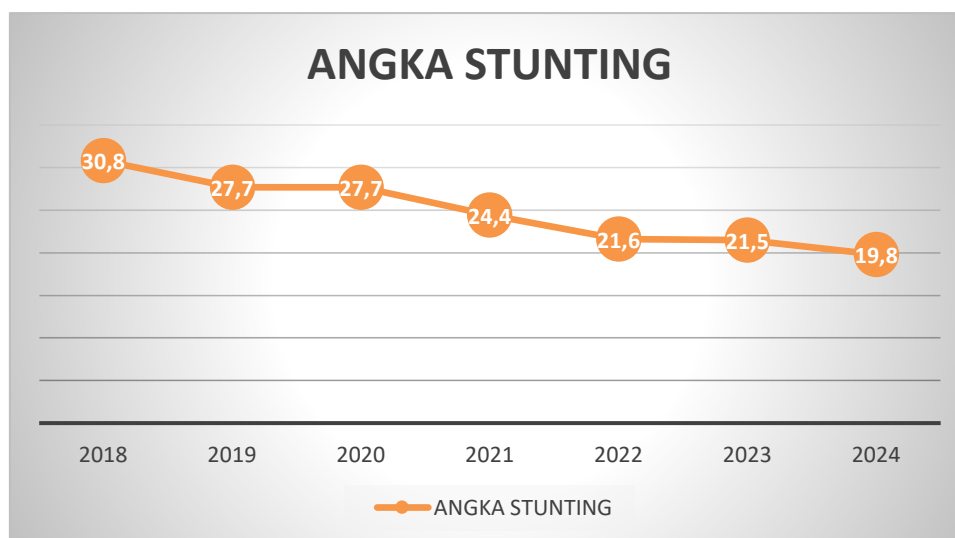
Rp2.803.590,00/bulan, naik sebesar 0,62 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp2.786.415,00/bulan.

Tabel 2.4 Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin, Maret 2024 dan September 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2024	582.932	4,78	2.786.415
September 2024	595.242	4,71	2.803.590
Perubahan Maret 2024– September 2024 (%)	2,11	-1,46	0,62

(Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia Sept 2024, BPS)

Garis kemiskinan merupakan salah satu yang dapat mengakibatkan terjadinya *stunting* dengan berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini dinilai cukup baik karena dapat berdampak pada penurunan angka *stunting*. Kemiskinan dapat mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia dari usia balita sampai dengan lanjut usia. Sebagian besar *stunting* berasal dari keluarga yang tergolong miskin atau berada di bawah garis kemiskinan. Adanya kemiskinan mengakibatkan keluarga tidak dapat mencukupi kualitas dan kuantitas dalam pemberian gizi pada anggota keluarga. Adapun angka *stunting* di Indonesia secara konsisten mengalami penurunan sejak 2019 yang berada pada 12,10 persen. Kemudian, kembali menurun pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 hingga 21,5 persen dan di tahun 2024 turun menjadi 19,8%. Kondisi ini menunjukkan penurunan terbaik dalam tujuh tahun terakhir.



Gambar 2.12 Angka Stunting Indonesia 2018–2024

(Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, Kemenkes- 2025)



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Hasil SSGI menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 adalah 19,8%. Angka ini lebih rendah 0,3% poin dari target prevalensi stunting yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 20,1%.

SSGI sendiri merupakan survei nasional yang bertujuan untuk mengetahui status gizi balita di Indonesia, termasuk indikator stunting, wasting, underweight, dan overweight, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Survei ini juga mengukur capaian indikator intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta memberikan data untuk menyusun kebijakan dan program perbaikan gizi yang lebih efektif.

Capaian tahun 2024 memberi angin segar bagi pencapaian target penurunan angka stunting nasional menjadi 14,2% pada tahun 2029, sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dari angka 21,5% di 2023, untuk dapat turun ke angka 14,2% di 2029, ini artinya Indonesia masih harus menurunkan sekitar 7,3% poin dalam lima tahun ke depan.

Capaian prevalensi stunting 19,8% ini juga menjadi tantangan baru, mengingat target penurunan stunting pada 2025 adalah 18,8%, membutuhkan upaya lebih keras dan kolaborasi lebih erat, terutama di enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat (638.000 balita), Jawa Tengah (485.893 balita), Jawa Timur (430.780 balita), Sumatera Utara (316.456 balita), Nusa Tenggara Timur (214.143 balita), dan Banten (209.600 balita).

Dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Stranas P3S) yang sudah disusun Setwapres, lebih mengedepankan faktor pencegahan. Strategi ini memastikan intervensi sejak masa pra-kelahiran, dengan fokus pada 11 intervensi spesifik khususnya untuk remaja putri dan ibu hamil, dan 9 intervensi sensitif. SSGI 2024 dilaksanakan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan didukung penuh oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan internasional, seperti WHO, SEAMEO RECFON, dan Prospera.

Upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan melalui (1) pendampingan setiap keluarga pada 1.000 hari pertama kehidupan; (2) pemenuhan alat ukur terstandar dan pelatihan rutin kepada kader; (3) penguatan layanan tata kelola gizi buruk; (4) penguatan kesiapsiagaan sistem kesehatan dan sistem pangan dalam ketahanan terhadap bencana, seperti pandemi Coronavirus Disease 2019; (5) perluasan cakupan pemberian makanan tambahan ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita kurus; (6) suplementasi tablet tambah darah; (7) imunisasi dasar lengkap; serta (8) penyediaan akses air minum perpipaan dan sanitasi yang aman. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi yang menyebabkan stagnasi penurunan stunting. Tantangan tersebut antara lain masih belum optimalnya sinergi intervensi antarstakeholders, masih rendahnya tingkat kesadaran pentingnya intervensi gizi spesifik, serta belum adanya satu data sasaran prioritas dalam pendampingan keluarga di tingkat lapangan.

Kondisi dan proyeksi dari perekonomian nasional, realisasi investasi, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, dan angka *stunting* merupakan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur untuk menyusun RKP tahun 2025 dengan tema “Akselerasi



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel 2.5 Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SASARAN 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50–5,00
3.	Penurunan Emisi GRK (%)	28,12
4.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% yoy): Akhir Periode	1,5–3,5 _a)
5.	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000–15.400 _b)
6.	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5–153,7
7.	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1–6,1 _c)
8.	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)–(0,2) _d)
9.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,9–20,0
10.	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,60
11.	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
12.	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,70–11,20
13.	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00–0,00 _c)
14.	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)–(2,80) _d)
15.	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,78–39,98
16.	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,8
17.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2–1.905,6
18.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5–842,2

Sumber: RKP Tahun 2024 (diolah)

Keterangan: a) Keputusan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Tingkat Menteri pada Januari 2024 dan sasaran inflasi dalam RPJPN Tahun 2025–2045; b) Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 7 Februari 2024; c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; serta d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5–3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000–Rp15.400 per US\$.



Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diprakirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

2.1.2. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur

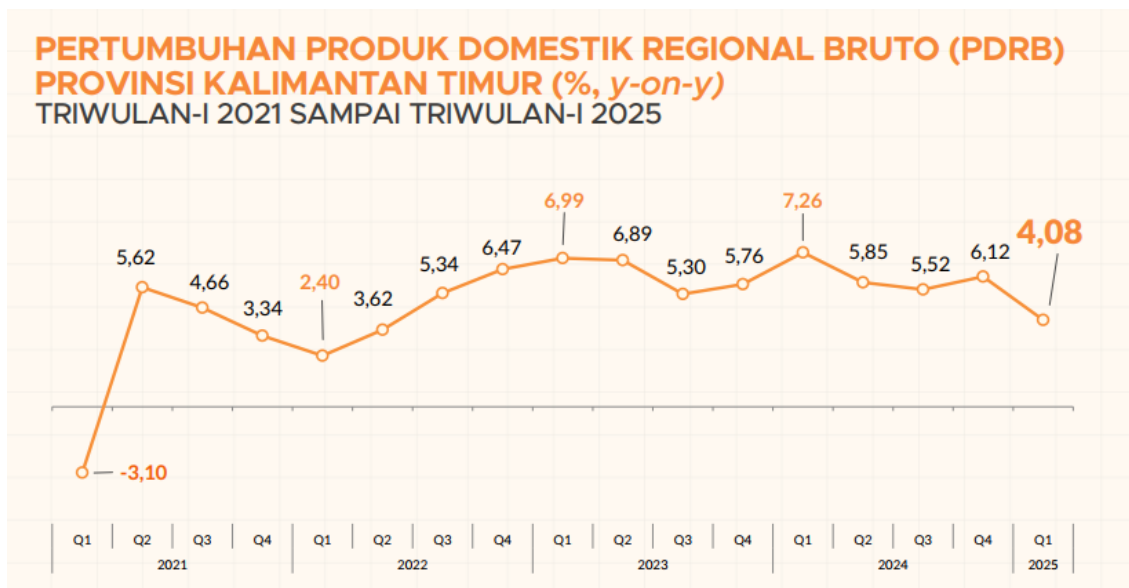
Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp217,52 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp144,70 triliun. Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 tumbuh sebesar 4,08 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

sebesar 14,22 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,23 persen.



Gambar 2.13 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kaltim (% , y-on-y)

(Sumber: BRS, BPS-Pertumbuhan ekonomi Kaltim-Mei 2025)

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi terhadap ekonomi, yaitu sebesar 35,34%. Komponen Pengeluaran Net Ekspor merupakan komponen dengan kontribusi tertinggi terhadap ekonomi, yaitu sebesar 43,23%. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi secara *y-on-y* sebesar 14,22%. Komponen Pengeluaran Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi secara *y-on-y* sebesar 6,23%. Secara *year on year* (*y-on-y*), kinerja ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I-2025 tumbuh positif sebesar 4,08 persen, melambat dibandingkan dengan kinerja ekonomi Triwulan I-2024 yang tumbuh sebesar 7,26 persen. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2025 didorong oleh capaian kinerja hampir seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,22 persen; diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,63 persen; dan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,36 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai salah satu lapangan usaha utama pembentuk perekonomian Provinsi Kalimantan Timur berkontraksi sebesar 0,63 persen.

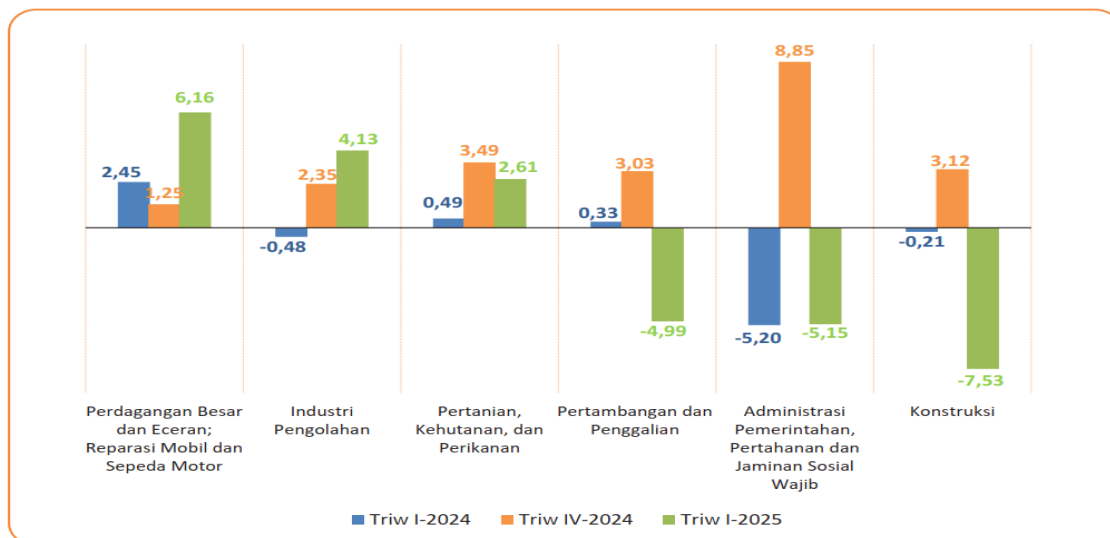
Ekonomi Kalimantan Timur Triwulan I-2025 dibanding Triwulan IV-2024 (*q-to-q*) berkontraksi sebesar 1,77 persen, disebabkan adanya penurunan kinerja ekonomi pada sebagian lapangan usaha. Pada periode ini, kinerja ekonomi pada delapan lapangan usaha di Kalimantan Timur mengalami penurunan. Tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam antara lain Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 7,53 persen; lalu Lapangan Usaha Administrasi



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,15 persen; serta Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,99 persen.



Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

(Sumber: BRS, BPS-Pertumbuhan ekonomi Kaltim-Mei 2025)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,08 persen (*y-on-y*), tumbuh positif melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan terjadi di sebagian komponen, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mengalami percepatan dan sebaliknya, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencapai 6,23 persen, didorong peningkatan permintaan berbagai komoditas unggulan hasil industri pengolahan yang dipasarkan ke luar wilayah, seperti hasil kilang BBM; produk bahan kimia dan pupuk; semen; feronikel; serta CPO dan turunannya. Pertumbuhan positif juga terjadi pada Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-Pemerintah) sebesar 5,58 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,33 persen dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,29 persen. Sedangkan, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami kontraksi jika dibandingkan Triwulan I-2024 sebesar 1,63 persen. Di sisi lain, komponen Impor Barang dan Jasa, yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran, tumbuh positif sebesar 7,41 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025 secara (*y-on-y*), maka sumbangan terbesar berasal dari Komponen Net Ekspor sebesar 2,62 persen, disusul Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 0,77 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,67 persen, dan komponen lainnya yang juga memberikan andil positif sebesar 0,02 persen.

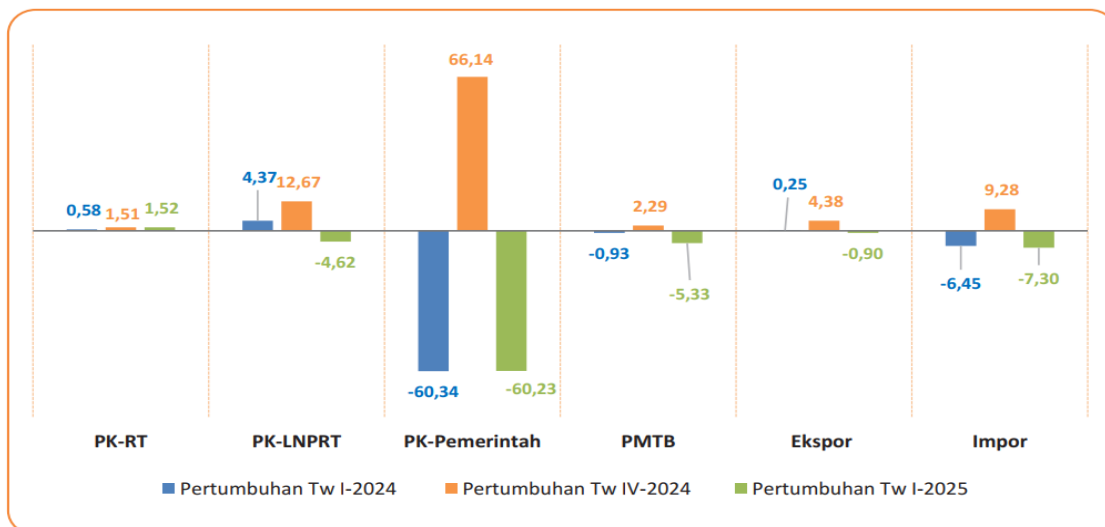


PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Perekonomian Kalimantan Timur pada Triwulan I-2025 dibandingkan dengan Triwulan IV- 2024 tumbuh negatif sebesar 1,77 persen disebabkan sebagian besar komponen PDRB menurut pengeluaran mengalami kontraksi. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan satu-satunya komponen yang tumbuh positif yaitu sebesar 1,52 persen. Komponen yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-Pemerintah) yang mengalami kontraksi hingga 60,23 persen, jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2024. Demikian pula, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,33 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh negatif sebesar 4,62 persen, dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh negatif sebesar 0,90 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa, yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran, juga mengalami kontraksi sebesar 7,30 persen jika dibandingkan triwulan sebelumnya.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi antartriwulan, andil pertumbuhan negatif diberikan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-Pemerintah) sebesar 3,95 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) turut sebesar 1,60 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 0,02 persen. Sedangkan, Komponen Net Ekspor dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) masih memberikan andil positif masing-masing sebesar 3,59 persen, dan 0,21 persen.



Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Kalimantan Timur (q-to-q) (persen), Triwulan I-2024, Triwulan IV-2024, dan Triwulan I-2025

(Sumber: BRS, BPS-Pertumbuhan ekonomi Kaltim-Mei 2025)

Target realisasi investasi tahun 2024 ditetapkan pencapaiannya sebesar Rp 76,02 Triliun. Pada Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2024 ini tercatat realisasi investasi mencapai angka Rp 20,49 Triliun, dengan rincian realisasi PMDN sebesar Rp 16,40 Triliun (6.219 proyek) dan realisasi PMA sebesar US\$ 272,65 Juta atau sebesar Rp 4,08 Triliun (744 proyek). Capaian realisasi investasi pada Triwulan



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

IV tahun 2024 sebesar Rp 20,49 Triliun dibandingkan Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp 22,14 Triliun mengalami penurunan sebesar 1,64 Triliun atau 8,04%. Jika dibandingkan dengan target realisasi investasi tahun ini yang sebesar Rp 76,02 Triliun maka untuk Triwulan IV mencapai 26,97%. Sedangkan jika dikumulatikan realisasi investasi dari bulan Januari-Desember tahun 2024 sebesar Rp 76,33 Triliun atau 100,41% dari target realisasi investasi pada tahun 2024.

Tabel 2.6 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi di Kaltim Per Okt-Des Tahun 2024

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Balikpapan	1.724	6.433.569.179.512	2.698	-
2	Kutai Barat	293	2.871.279.551.305	234	1
3	Kutai Timur	445	1.740.318.477.436	1.582	-
4	Kutai Kartanegara	1.003	1.529.940.226.939	1.651	1
5	Bontang	328	1.137.269.590.019	134	-
6	Paser	306	766.951.823.281	1.436	-
7	Penajam Paser Utara	139	760.736.211.589	171	-
8	Berau	379	632.118.352.454	836	-
9	Samarinda	1.566	487.452.307.114	1.494	-
10	Mahakam Ulu	36	50.236.863.084	42	-
TOTAL		6.219	16.409.872.582.733	10.278	2

(Sumber: Press Release, DPMPTSP Kaltim-Feb 2025)

Realisasi PMDN Triwulan IV tahun 2024 mencapai Rp 16,40 Triliun, dengan jumlah proyek sebanyak 6.219, dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi. Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 6,43 Triliun atau 39,21% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN. Investasi terbesar kedua sebesar Rp 2,87 Triliun atau 17,50% berada di Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Timur menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 1,74 Triliun atau 10,61%. Terkait penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kota Balikpapan paling banyak penyerapannya yaitu sebanyak 2.698 orang, kemudian disusul Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 1.651 orang, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 1.582 orang. Total penyerapan tenaga kerja asing dari seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 2 orang. Total penyerapan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing selama periode Triwulan IV ini sebanyak 10.280 orang.

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dapat dicapai sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 menunjukkan subsektor Pertambangan mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 5,87 Triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 35,81%. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan peralatannya sebagai kontributor kedua mencapai Rp. 3,11 Triliun atau 18,98%. Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi kontributor ketiga mencapai Rp. 2,38



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Triliun atau 14,54%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 22 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai investasi PMDN pada Triwulan IV tahun 2024.

Realisasi PMA pada Triwulan IV tahun 2024 mencapai US\$ 272,65 Juta atau sebesar Rp 4,08 Triliun, dengan sebaran yang berada di 10 kabupaten/kota. Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$. 82,33 Juta atau sebesar Rp 1,23 Triliun (30,20% dari total realisasi PMA), terdiri atas 70 proyek PMA. Kota Balikpapan menjadi kontributor kedua yaitu mencapai US\$ 53,68 Juta atau sebesar Rp. 805,20 Miliar (19,69% dari total realisasi PMA). Sedangkan Kabupaten Kutai Timur merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US\$. 44,66 Juta atau sebesar Rp. 669,99 Miliar (16,38% dari total realisasi PMA). Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 1.525 orang, disusul Kabupaten Kutai Timur sebanyak 511 orang, dan Kota Balikpapan sebanyak 165 orang. Total penyerapan tenaga kerja asing dari seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 33 orang. Total penyerapan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing selama periode Triwulan IV sebanyak 2.753 orang.

Tabel 2.7 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kaltim Periode Okt-Des Tahun 2024

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Kutai Kartanegara	70	82.331.433	1.525	18
2	Balikpapan	300	53.680.625	165	-
3	Kutai Timur	65	44.666.239	511	6
4	Penajam Paser Utara	21	25.418.357	2	1
5	Paser	19	23.806.562	115	-
6	Berau	50	16.538.439	155	-
7	Mahakam Ulu	26	16.446.367	-	-
8	Kutai Barat	35	7.909.695	142	4
9	Samarinda	146	1.838.537	105	4
10	Bontang	12	22.400	-	-
TOTAL		744	272.658.653	2.720	33

(Sumber: Press Release, DPMPTSP Kaltim-Feb 2025)

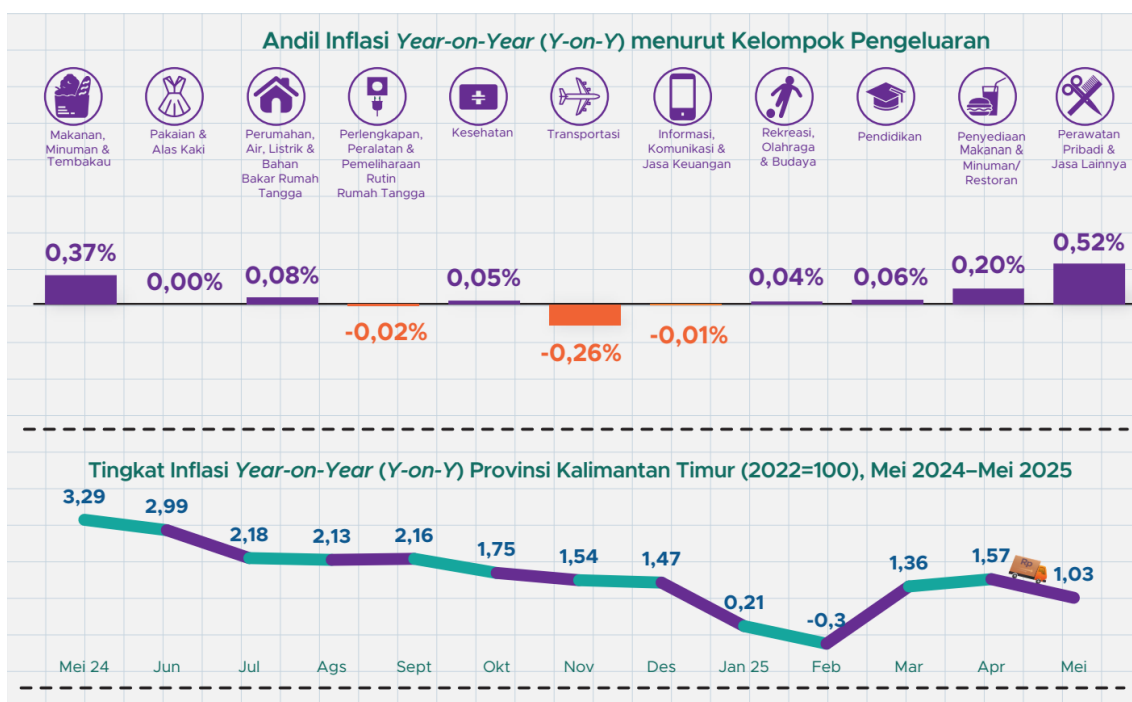
Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan mendapatkan tambahan investasi terbesar yaitu US\$ 81,61 Juta (Rp 1,22 Triliun) atau sebesar 29,93% dari keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar bagi investasi di wilayah ini adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya yaitu sebesar US\$ 45,26 Juta (Rp 678,92 Miliar) atau 16,60% dan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar US\$ 42,43 Juta (Rp 636,59 Miliar) atau 15,57%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 19 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai investasi PMA pada Triwulan IV tahun 2024



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Mei 2025 terjadi inflasi *year on year* (*y-on-y*) Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,32. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1,27 persen dengan IHK sebesar 109,05; sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Berau sebesar 0,92 persen dengan IHK sebesar 108,55. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,22 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,45 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,67 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,45 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,48 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,93 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,11 persen. Sebaliknya, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,44 persen; kelompok transportasi sebesar 1,96 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen.



Gambar 2.16 Andil inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) menurut kelompok pengeluaran
Tingkat inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) Prov. Kaltim (2022-100), Mei 2024-Mei 2025
(Sumber: BRS, BPS-Perkembangan IHK Kaltim-Juni 2025)

Pada Mei 2025, tingkat inflasi *y-on-y* Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,03 persen dengan tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,30 persen. Sementara pada Mei 2024, tingkat inflasi *y-on-y* Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,29 persen dengan tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,75 persen. Pada Mei 2025, dari 4 Kabupaten/Kota cakupan IHK di Provinsi Kalimantan Timur secara *y-on-y* mengalami inflasi. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1,27 persen dengan IHK



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

sebesar 109,05; sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Berau sebesar 0,92 persen dengan IHK sebesar 108,55.

Tabel 2.8 Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Mei 2025 Kabupaten/Kota di Prov. Kaltim

Kabupaten/Kota	Mei 2025		
	IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kab Berau ¹	108,55	0,92	-0,51
2. Kab Penajam Paser Utara ¹	109,05	1,27	-0,28
3. Kota Balikpapan ²	108,58	1,01	-0,28
4. Kota Samarinda ²	107,93	1,03	-0,38
PROVINSI	108,32	1,03	-0,35

Keterangan:

¹ Sampel baru SBH2022, penamaan wilayah administrasi kabupaten IHK dan inflasi menggunakan nama kabupaten.

² Sampel lanjutan dari SBH2018, penamaan wilayah administrasi kota IHK dan inflasi menggunakan nama kota.

(Sumber: BRS, BPS-Perkembangan IHK Kaltim-Juni 2025)

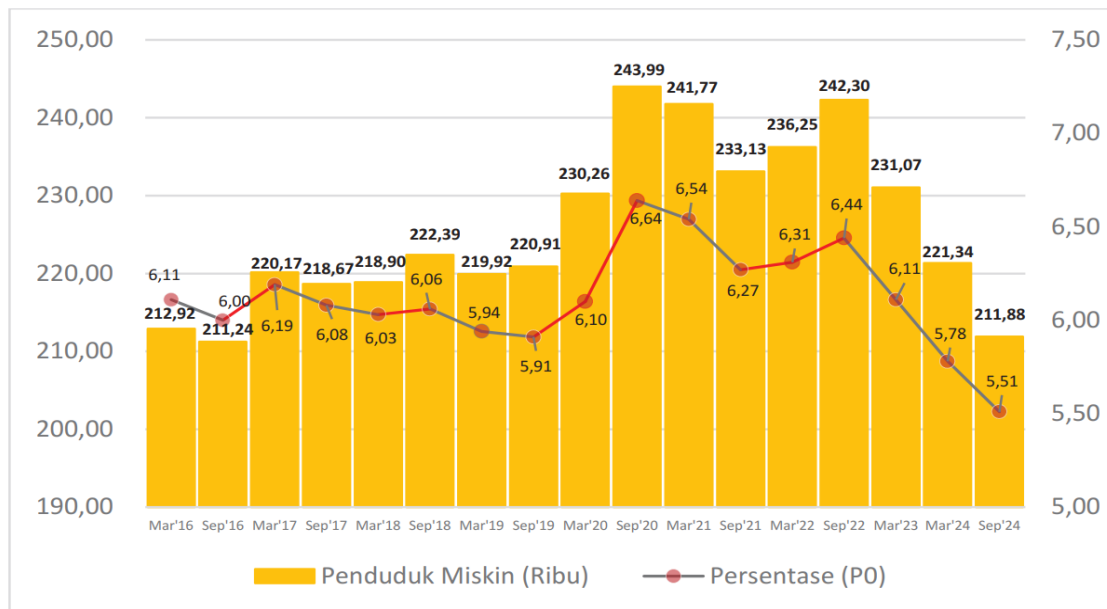
Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 5,51 persen, menurun 0,27 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 211,88 ribu orang, menurun 9,5 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 19,19 ribu orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 4,41 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,47 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 8,00 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 8,76 persen. Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,3 ribu orang (dari 118,44 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 118,11 ribu orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 9,2 ribu orang (dari 102,90 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 93,69 ribu orang pada September 2024). Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp 853.997,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 604.133,00 (70,74 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 249.864,00 (29,26 persen). Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5,32 orang anggota



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 4.543.264,-/rumah tangga miskin/bulan.



Gambar 2.17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2016–September 2024

(Sumber: BRS, BPS-Profil Kemiskinan Kaltim-Jan 2025)

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2023 sampai dengan September 2024. Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp 853.997 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,40 persen.

Tabel 2.9 Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin, Maret 2023–September 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2023	790.186	5,13	4.053.654
Maret 2024	833.955	5,13	4.278.189
September 2024	853.997	5,32	4.543.264
Perubahan Maret 2024–September 2024 (%)	2,40	3,70	6,20

(Sumber: BRS, BPS-Profil Kemiskinan Kaltim-Jan 2025)

Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar Rp 4.543.264/bulan, naik sebesar 6,20 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp 4.278.189/bulan.

Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2019–2020 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah terjadi penurunan jumlah kematian ibu dari 83 jiwa menjadi 74 jiwa. Sedangkan jumlah kematian bayi (0–11) bulan juga mengalami penurunan dari 643 bayi pada tahun 2022 menjadi 589 bayi pada tahun 2024.

Tabel 2.10 Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	15,50	23,60	24,90	22,40	17,80
2	KUBAR	16,60	15,80	23,10	22,00	21,00
3	KUKAR	14,30	26,40	27,10	17,60	11,80
4	KUTIM	16,10	27,50	24,70	29,00	20,60
5	Berau	17,60	25,70	21,60	23,00	17,20
6	PPU	11,40	27,30	21,80	24,60	21,90
7	MAHULU	9,60	20,30	14,80	N/A	18,30
8	Balikpapan	13,30	17,60	19,60	21,60	20,20
9	Samarinda	11,90	21,60	25,30	24,40	15,20
10	Bontang	20,90	26,30	21,00	27,00	16,50

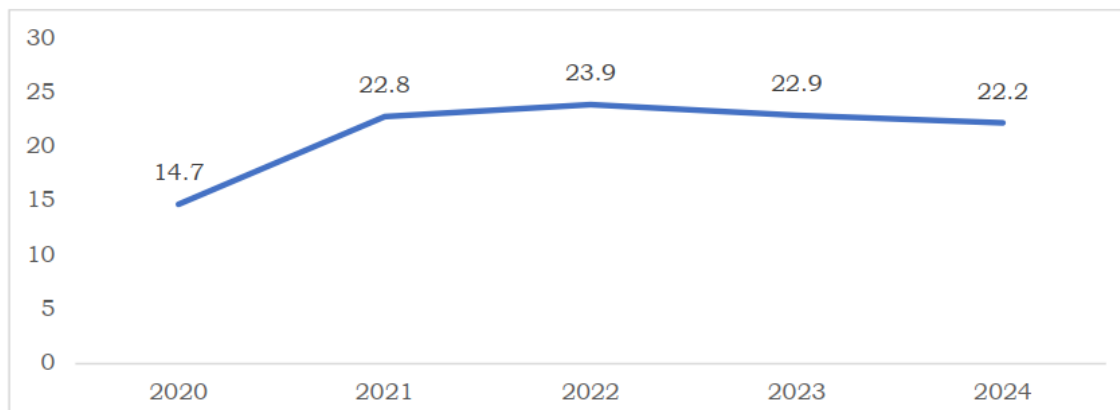
(Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, Kemenkes- 2025)

Prevalensi stunting merupakan persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting. Prevalensi ini digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah. Prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2024 berada urutan ke 19. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka stunting di Kalimantan Timur cenderung menurun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Meskipun demikian, kinerja penurunan prevalensi stunting ini masih belum sesuai dengan harapan. menurut rekomendasi WHO, *Cut of Point* stunting tidak dinyatakan bermasalah apabila <20 persen, namun sampai dengan tahun 2024 prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih berada di angka 22,2 persen. Angka ini di atas prevalensi stunting nasional yang mencapai 19,8. Secara nasional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2023 berada urutan ke-22 dan pada tahun 2024 meningkat berada pada peringkat ke-19.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025



Gambar 2.18 Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 berdasarkan Hasil Survei SSGI

(Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, Kemenkes- 2025)

Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam menangani prevalansi stunting yaitu perubahan perilaku masyarakat terkait pola asuh dan pemahaman tentang gizi, kurangnya akses ke makanan bergizi, layanan kesehatan yang kurang memadai, sanitasi yang buruk dan kurangnya akses terhadap air bersih. Diperlukan dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada Tahun 2025, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11 Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian		Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50-6,50
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	280,00
3	Inflasi (persen)	3,00
4	Investasi Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	37,14

(Sumber: RKPD Prov. Kaltim- 2025)

Pada Tahun 2025, merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2024 yang diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tersebut, diharapkan pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 5,50-6,50 persen dan untuk tahun



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

2024 juga diharapkan mampu tumbuh positif pada 4,30-5,10 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara dan kelapa sawit, bertambahnya kapasitas dan produk turunan industri CPO, beroperasionalnya *Refinery Development Master Project (RDMP)* RU V Balikpapan, pembangunan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2025, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

- 1) Menuju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara mencapai 9,50 – 10,0 Persen, yakni melalui :
 - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong produktivitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
 - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian melalui intensifikasi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan ekstensifikasi perkebunan;
 - c) Mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum serta pariwisata dengan menangkap peluang dari hadirnya IKN; dan
 - d) Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.
- 2) Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan Meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
- 3) Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencapai 6 persen, melalui:
 - a) Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai superhub ekonomi IKN;
 - b) Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga;
 - c) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik; dan
 - d) Meningkatkan *nett* ekspor perdagangan antar wilayah terutama pada komoditi non pertambangan. Mendorong peran komoditas hasil olahan industri untuk peningkatan ekspor perdagangan antar wilayah.

2.1.3. Kinerja Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bontang

Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen. Perkembangan ini didorong oleh dampak positif hari libur nasional terkait dengan Hari Besar Keagamaan



khususnya Idul Fitri yang mendorong mobilitas penduduk dan pariwisata serta aktivitas ekonomi lainnya. Dari sektor transportasi, moda angkutan laut mengalami kenaikan yang signifikan tumbuh 25,91% (y-on-y), sementara dari sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan nusantara tumbuh 12,71% (y-on-y) dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh sebesar 7,83% (y-on-y).

Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, hingga Triwulan I tahun 2025, perekonomian Kalimantan Timur menunjukkan tren pertumbuhan positif. PDRB Kalimantan Timur Triwulan I-2025 tumbuh 4,08 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,22 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,23 persen. Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2025 berkontraksi sebesar 1,77 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, beberapa lapangan usaha mengalami penurunan kinerja, namun masih terdapat beberapa lapangan usaha yang tumbuh positif. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 1,52 persen.

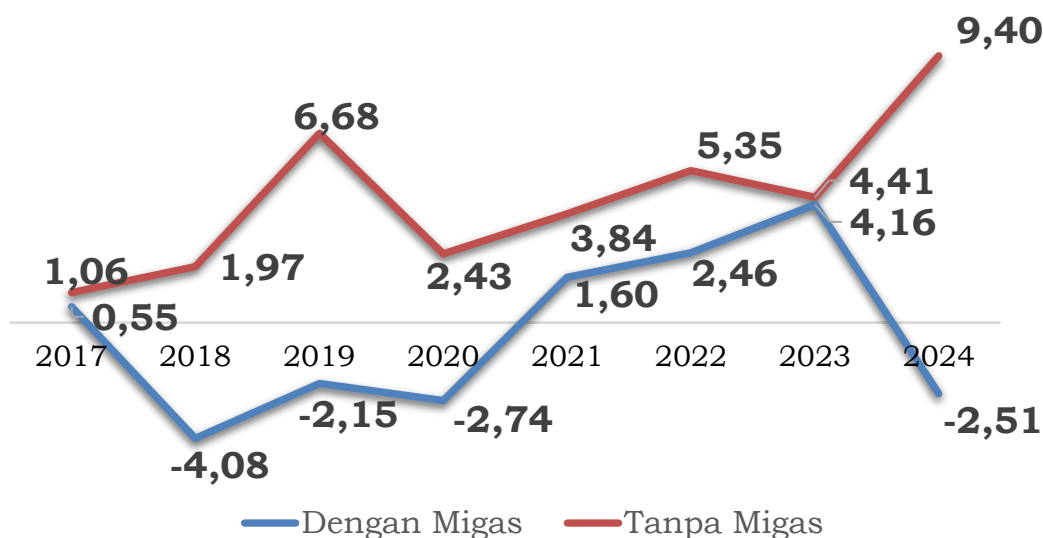
Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dapat dianalisis melalui PDRB Dengan Migas serta PDRB Tanpa Migas. Selama periode 2017-2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bontang cukup fluktuatif. Tahun 2020 pada masa pandemi Covid LPE sempat mengalami penurunan dari 6,68% di tahun 2019 menjadi hanya 2,43% di tahun 2020 (dengan PDRB Tanpa Migas), namun bila dihitung melalui PDRB Dengan Migas, di tahun 2020 tersebut LPE menunjukkan angka negatif sebesar -2,74. Dengan menggunakan basis PDRB Dengan Migas, LPE Kota Bontang terlihat rendah. Selama 2017-2024 LPE tertinggi terjadi di tahun 2023 yaitu 4,16% dan di tahun 2024 turun drastis menjadi -2,51%. Terlihat selama 2017-2024 LPE mengalami pertumbuhan negatif beberapa kali yaitu tahun 2018 (-4,08%); tahun 2019 (-2,15%); tahun 2020 (-2,74%); serta tahun 2024 (-2,51%).

Hal yang berbeda terjadi saat LPE Kota Bontang dihitung Tanpa Migas, LPE tahun 2024 bahkan mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 9,40%; jauh di atas LPE nasional. Perbedaan LPE antara PDRB Dengan Migas serta PDRB Tanpa Migas terlihat cukup tinggi. Hanya pada tahun 2023 saja perbedaan tersebut sangat kecil. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2017-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025



Gambar 2.19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2017-2024
(Sumber: BPS, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

Fluktuasi LPE selama 2017-2024 mengindikasikan tingginya ketergantungan perekonomian Kota Bontang terhadap sektor industri pengolahan, khususnya industri pengolahan Migas. Guncangan LPE dengan migas disebabkan antara lain oleh fluktuasi harga, fluktuasi permintaan khususnya dari luar negeri, kapasitas produksi, serta kebijakan pemerintah sangat sensitif terhadap nilai PDRB sektor industri pengolahan. Ketergantungan perekonomian yang tinggi terhadap industri pengolahan migas menyebabkan capaian LPE tidak stabil dari tahun ke tahun akibat adanya kerentanan terhadap gejala faktor eksternal. Pertumbuhan PDRB Kota Bontang berdasarkan harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontang tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,51	3,50	2,27	2,28	1,57	5,86
B	Pertambangan dan Penggalian	-18,18	-10,77	-10,32	-11,21	-5,93	-4,82
C	Industri Pengolahan	-3,55	-3,77	1,63	1,64	3,87	-4,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,92	12,32	-2,14	3,89	17,41	10,63
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,16	1,86	4,36	4,96	4,89	8,96
F	Konstruksi	5,75	0,03	0,12	8,15	6,71	7,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran	4,20	3,73	0,65	5,81	5,51	7,05
H	Transportasi	3,39	3,14	3,30	8,25	3,83	4,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,72	-1,41	1,51	8,25	9,27	6,76
J	Informasi dan Konstruksi	3,05	5,60	5,92	5,38	6,32	13,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,43	3,45	2,44	10,12	10,19	1,30
L	Real estate	4,32	3,45	2,44	10,12	2,81	4,87



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
M	Jasa Perusahaan	3,06	-1,72	1,65	5,23	6,04	7,34
N	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,38	-3,18	1,01	6,12	2,53	23,92
O	Jasa Pendidikan	4,97	5,28	2,24	2,32	5,05	4,21
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,48	17,65	14,16	4,23	5,48	3,76
Q	Jasa lainnya	5,93	-1,02	1,08	6,35	5,65	9,98
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-2,15	-2,74	1,60	2,46	4,16	-2,51

(Sumber: BPS, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, diikuti Lapangan Usaha informasi dan konstruksi dan Pengadaan Listrik dan gas.

Dalam struktur PDRB Kota Bontang, terdapat sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan tinggi meski proporsinya kecil. Sektor pertanian misalnya, proporsi di tahun 2020 hanya 1,25% dan di tahun 2024 juga hanya 1,21%; namun sektor ini memiliki pertumbuhan yang tinggi yaitu berkisar 5% s.d. 6% dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 3,08%. Hal yang sama juga terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang memiliki kontribusi hanya 0,57% di tahun 2020 dan 0,67% di tahun 2024 namun sektor ini memiliki pertumbuhan yang tinggi yaitu rata-rata 4,79% per tahun. Beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi namun kontribusi kecil adalah sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa pendidikan, serta sektor informasi dan komunikasi.

Jika dilihat dari distribusi PDRB, lapangan usaha Industri Pengolahan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, diikuti dengan lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Adapun distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontang Tahun 2020-2024

No	Kategori/ Sub Kategori	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020-2024 (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,25	1,23	1,17	1,14	1,21
B	Pertambangan dan Penggalan	0,48	0,51	0,51	0,37	0,36
C	Industri Pengolahan	79,28	79,42	78,73	78,37	76,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	6,38	6,69	6,49	7,04	8,07



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

No	Kategori/ Sub Kategori	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020-2024 (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,07	3,40	3,30	3,32	3,70
H	Transportasi dan Pergudangan	1,43	1,58	1,66	1,80	2,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,59	0,57	0,58	0,67
J	Informasi dan Komunikasi	0,78	0,86	0,87	0,85	1,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,77	0,83	0,84	0,92	1,01
L	Real Estate	0,45	0,50	0,50	0,47	0,49
M	Jasa Perusahaan	0,46	0,50	0,50	0,53	0,61
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,43	1,45	1,41	1,37	1,63
O	Jasa Pendidikan	1,07	1,21	1,21	1,23	1,32
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,92	1,03	1,01	1,05
Q	Jasa Lainnya	0,40	0,42	0,41	0,41	0,48
Total Distribusi PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber: BPS, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

Menurut jenis pengeluaran maka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Bontang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bontang Tahun 2020-2024

No	Kategori/ Sub Kategori	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2020-2024 (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,92	10,68	10,35	10,40	11,09
C	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,56	0,55	0,5	0,56	0,64
D	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,86	1,91	1,93	2,34	3
E	Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,29	13,72	13,99	14,53	15,75
F	Perubahan Inventori	0,05	0,02	0,02	-0,01	0
G	Net Ekspor Barang dan Jasa	73,31	73,11	73,15	72,18	69,52
Total Distribusi PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber: BPS, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

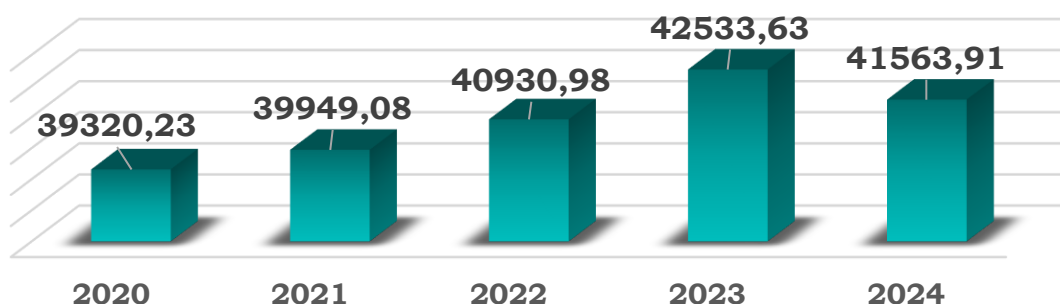


PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi paling besar dari PDRB berdasarkan Pengeluaran ditahun 2024 disumbang dari net ekspor barang dan Jasa sebesar 69,52% dari total PDRB. Adapun nilai net ekspor barang dan jasa dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Distribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Gambar 2.20 Grafik Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kota Bontang berdasarkan harga Konstan Tahun 2020-2024

(Sumber: BPS, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai Net Ekspor Barang dan Jasa di Kota Bontang mengalami peningkatan sejak tahun 2020, namun terjadi penurunan nilai ekspor di tahun 2024. Hal ini terjadi karena penurunan harga komoditi dunia untuk amoniak dan methanol serta adanya pembatasan kuota urea, sementara dari sektor migas yaitu tidak beroperasinya 6 train dari total 8 train yang menyebabkan menurunnya jumlah produksi migas.

Peningkatan investasi merupakan salah satu prioritas pengembangan ekonomi daerah yang terus menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan daya saing investasi diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di Kota Bontang dan menstimulasi perluasan dan serapan tenaga kerja dan pertumbuhan

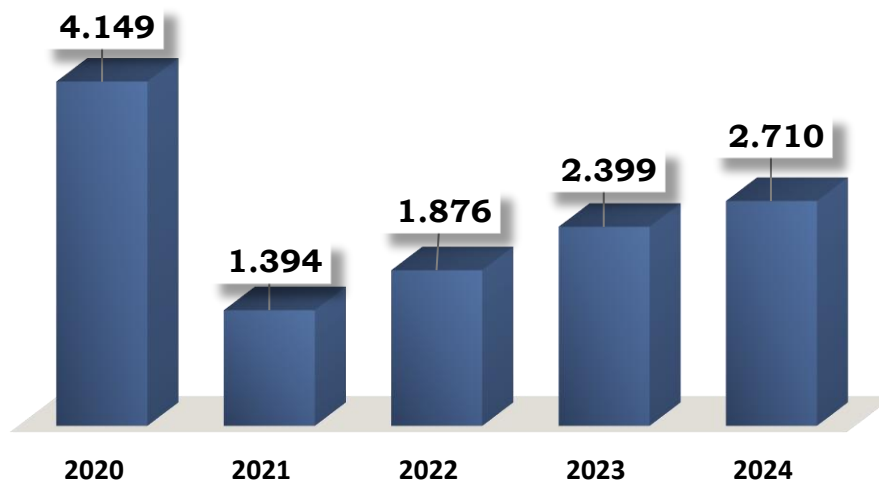


PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

ekonomi, antara lain pemberian insentif penyertaan modal, pameran investasi, penyediaan Kawasan industri Bontang Lestari.

Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)



Gambar 2.21 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Bontang Tahun 2020 - 2024 (dalam Miliar Rupiah)

(Sumber: Press Release DPMPTSP Kaltim, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

Tabel 2.15 Nilai Investasi PMDN Prov. Kaltim dan 10 Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	2021		2022		2023	
	Proyek	Nilai Investasi Juta Rp	Proyek	Nilai Investasi Juta Rp	Proyek	Nilai Investasi Juta Rp
Kabupaten Kutai Barat	87	1.437.227,9	91	2.631.773,8	269	3.253.522,5
Kota Samarinda	863	585.533,3	1.126	1.270.879,5	1.756	2.894.239,2
Kabupaten Berau	159	445.264,4	218	2.619.004,0	461	4.303.938,7
Kabupaten Penajam Paser Utara	104	404.886,0	142	1.253.095,9	167	1.475.716,7
Kabupaten Paser	216	567.121,5	168	1.616.947,7	359	2.458.132,4
Kabupaten Mahakam Hulu	11	575.498,9	10	284.958,9	18	189.188,7
Kota Bontang	563	910.229,6	437	1.243.154,1	473	2.413.301,9
Kota Balikpapan	1.457	16.773.016,6	1.120	14.681.981,5	2.423	20.501.290,7
Kabupaten Kutai Kartanegara	321	3.319.550,0	460	10.564.907,7	980	9.440.538,2
Kabupaten Kutai Timur	536	5.279.054,0	447	3.428.929,9	665	5.241.826,7
Kalimantan Timur	4.317	30.297.382,2	4.219	39.595.633,0	7.571	52.171.695,7

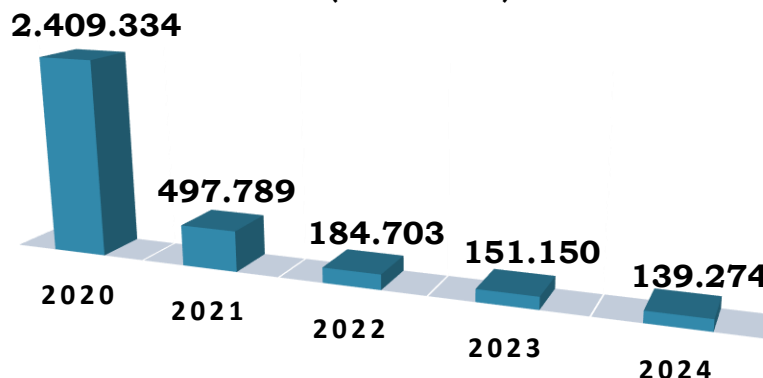
(Sumber: Press Release DPMPTSP Kaltim, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

**Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)
(Juta US\$)**



Gambar 2.22 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Kota Bontang Tahun 2020-2024

(Sumber: Press Release DPMPTSP Kaltim, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

Tabel 2.16 Nilai Investasi PMA Prov. Kaltim dan 10 Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	2021		2022		2023	
	Proyek	Nilai Investasi US\$.	Proyek	Nilai Investasi US\$.	Proyek	Nilai Investasi US\$.
Kabupaten Kutai Barat	23	29.653,6	24	198.435,5	40	105.779,9
Kabupaten Berau	40	35.752,7	37	49.370,5	55	46.997,3
Kota Samarinda	76	17.125,0	83	32.438,0	116	23.518,3
Kabupaten Penajam Paser Utara	9	1.602,8	11	9.866,0	18	10.907,2
Kabupaten Paser	17	31.190,4	19	109.068,6	24	77.903,8
Kabupaten Mahakam Hulu	6	123,9	6	3.808,0	28	23.096,0
Kota Bontang	10	65.331,3	7	8,0	11	10.249,5
Kota Balikpapan	128	193.184,1	165	51.882,8	338	244.869,1
Kabupaten Kutai Kartanegara	65	122.865,6	69	180.418,5	110	331.153,7
Kabupaten Kutai Timur	54	248.360,8	65	630.926,0	82	458.235,8
Kalimantan Timur	428	745.190,2	486	1.266.221,9	822	1.332.710,6

(Sumber: Press Release DPMPTSP Kaltim, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

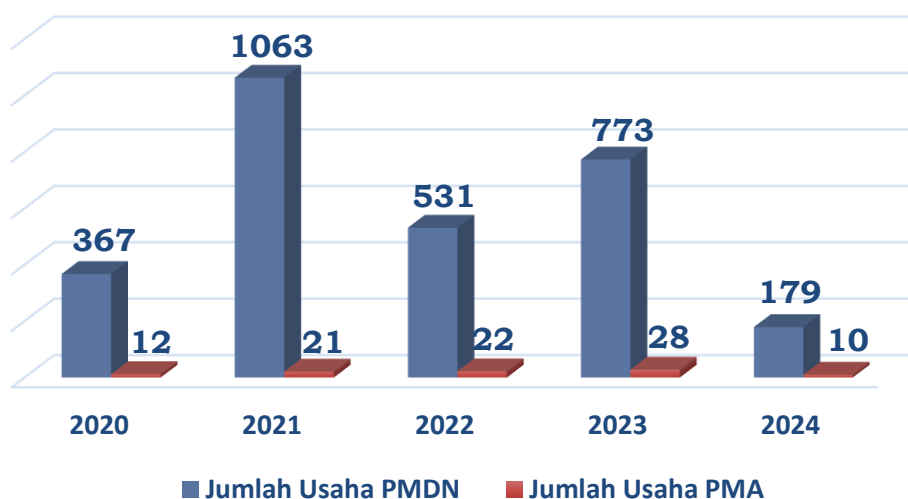
Berdasarkan Gambar 2.21 dan Tabel 2.22 di atas dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi mengalami trend kenaikan moderat namun dengan angka yang lebih rendah dibanding PMDN. Sementara dari tabel 2.15 dan 2.16 terlihat bahwa dibanding daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur, nilai investasi Kota Bontang termasuk terendah. Masih rendahnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Kota Bontang bisa dipengaruhi beberapa hal, seperti penurunan daya



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

tarik investasi, ketidakpastian kondisi global serta persaingan regional yang lebih kompetitif sehingga investor lebih memilih daerah lain. Untuk itu Pemerintah Kota Bontang terus berupaya mendukung pertumbuhan investasi dengan menjaga iklim investasi yang baik di Kota Bontang dan penyediaan kawasan industri KIE, penyusunan Raperda Kemudahan Insentif Penanaman Modal serta penyusunan peta potensi investasi yang diharapkan dapat memberikan informasi bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya ke Kota Bontang.



Gambar 2.23 Jumlah Proyek Investasi PMDN dan PMA di Kota Bontang Tahun 2020-2024

(Sumber: DPMPSTSP Kota Bontang, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah proyek/usaha PMDN dan PMA mengalami fluktuasi. Sempat mengalami kenaikan tajam pada tahun 2021 yang mana kondisi Kota Bontang serta daerah lain di Indonesia justru sedang dalam masa pandemi, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk pemberian bantuan usaha yang berdampak meningkatnya jumlah investor PMDN yang mengajukan usahanya melalui system OSS. Jumlah investor baik PMDN dan PMA mengalami penurunan cukup tajam di tahun 2024, namun dari sisi realisasi investasi terjadi peningkatan sebesar 12,97% dibanding tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa jumlah investor masuk lebih sedikit tetapi nilai proyek yang dikerjakan lebih besar, salah satunya Pembangunan pabrik ammonia di Kawasan industri KIE.

Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,36 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,73. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 1,71 persen dengan IHK sebesar 108,37; sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1,19 persen dengan IHK sebesar 108,03.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki



sebesar 0,42 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,99 persen; kelompok transportasi sebesar 0,88 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,64 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,11 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,37 persen. Sebaliknya, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,40 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,64 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Maret 2025, antara lain: makan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 2,64%, kemudian perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi sebesar 1,32%.

Pada Maret 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 1,13%. Disusul oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,46%. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil inflasi sebesar 0,22%. Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,36 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,73. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 1,71 persen dengan IHK sebesar 108,37; sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1,19 persen dengan IHK sebesar 108,03.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,84 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,42 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,99 persen; kelompok transportasi sebesar 0,88 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,64 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,39 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,11 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,37 persen. Sebaliknya, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,40 persen; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,64 persen.

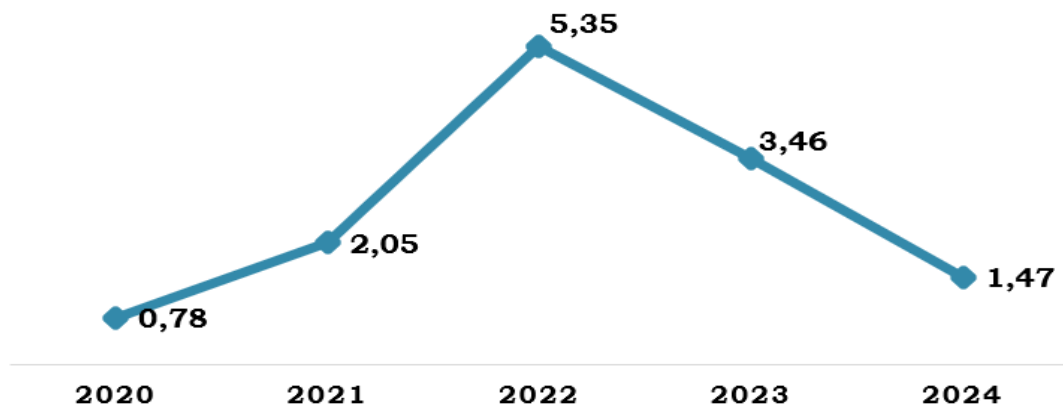
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Maret 2025, antara lain: makan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 2,64%, kemudian perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi sebesar 1,32%. Pada Maret 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 1,13%. Disusul oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,46%. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil inflasi sebesar 0,22%.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

**Tingkat Inflasi di Kota Bontang
Tahun 2020-2024**



Gambar 2.24 Tingkat Inflasi year on year Kota Bontang Bulan Desember 2024

(Sumber: BPS Kota Bontang, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kota Bontang menunjukkan penurunan sebanyak 0,36 poin, menjadi 3,74 persen. Penurunan ini mengindikasikan bahwa lebih banyak warga Kota Bontang yang hidup di atas garis kemiskinan. Hal ini sejalan dengan bertambahnya peluang kerja di daerah tersebut, yang memungkinkan mereka yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan untuk keluar dari kondisi tersebut. Untuk memastikan angka kemiskinan terus menurun sesuai target, langkah strategis yang diambil meliputi pengembangan program pemberdayaan ekonomi (seperti meningkatkan akses ke lapangan kerja, pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, serta inovasi ekonomi lokal), penguatan jaminan sosial (antara lain dengan meningkatkan akses ke program perlindungan sosial, memberi asuransi kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, serta subsidi pendidikan), dan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar (memberikan masyarakat miskin akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi umum).

Indikator sasaran angka kemiskinan pada P-RKPD tahun 2025 yaitu 3,31-3,73% mengalami penurunan sebesar 0,07% dari target RKPD murni 2025 yaitu 3,8% dan realisasi per Triwulan I tahun 2025 yaitu 3,74%. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Bontang. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang dalam menurunkan angka kemiskinan yaitu sinkronisasi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas data kemiskinan, peningkatan pemberdayaan masyarakat tidak mampu, pemetaan program penanggulangan kemiskinan menggunakan satu basis data serta peningkatan kualitas jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat. Selain itu, Pemerintah hadir mengayomi masyarakat tidak mampu melalui berbagai program sosial yang berbasis inklusi, memberikan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan dan bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberian beasiswa, pelatihan keterampilan, fasilitasi permodalan usaha, serta program perlindungan sosial yang komprehensif. Dengan demikian, angka



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan, sehingga masyarakat lebih mandiri dan mampu berdaya saing.

Tabel 2.17 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kota dalam Angka Kemiskinan Bontang Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target RKPDP 2025	Realisasi Triwulan I 2025
1.	Angka Kemiskinan	Persen	3,8	3,74*

(Sumber: BPS Kota Bontang, RKPDP Perubahan Kota Bontang 2025)

*) Data realisasi tahun 2024

Prevalensi stunting merupakan persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting. Prevalensi ini digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah. Prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2024 berada urutan ke 19. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka stunting di Kalimantan Timur cenderung menurun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Meskipun demikian, kinerja penurunan prevalensi stunting ini masih belum sesuai dengan harapan. menurut rekomendasi WHO, *Cut of Point* stunting tidak dinyatakan bermasalah apabila <20 persen, namun sampai dengan tahun 2024 prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih berada di angka 22,2 persen. Angka ini di atas prevalensi stunting nasional yang mencapai 19,8 persen.



Gambar 2.25 Tingkat prevalensi stunting Kota Bontang 2020-2024

(Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, RKPDP Prov. Kaltim- 2025)



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan grafik bisa disimpulkan walaupun tingkat prevalensi stunting di Kota Bontang mengalami fluktuasi tetapi hasil Survei Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2024 menyajikan angka penurunan prevalensi *stunting* di Kota Bontang semula di tahun 2023 sebesar 27% turun sebanyak 10,5% menjadi 16,5%. Hal ini bukan perkara yang mudah karena begitu banyaknya indikator penilaian yang dilakukan dalam melakukan survei mengenai *stunting*. Dan jika dilihat dari status gizi menurut TB/U di Kalimantan Timur tahun 2024 Kota Bontang menempati urutan ke-3 dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dengan angka *stunting* terendah di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan angka 11,8% disusul dengan Kota Samarinda dengan angka 15,2% dan prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Penajam Paser utara dengan angka 21,9%.

Kabupaten / Kota	Status Gizi menurut TB/U						N
	Severely Stunting		Stunting		Normal		
	%	95%CI	%	95%CI	%	95%CI	
Paser	5,6	3,7 - 8,4	17,8	14,4 - 21,8	76,5	72,3 - 80,3	538
Kutai Barat	6,6	4,4 - 9,9	21,0	16,0 - 27,0	72,4	65,9 - 78,0	445
Kutai Kartanegara	2,5	1,4 - 4,4	11,8	9,0 - 15,2	85,8	82,0 - 88,9	549
Kutai Timur	6,3	4,0 - 9,8	20,6	17,1 - 24,5	73,1	68,7 - 77,2	578
Berau	6,2	3,3 - 11,1	17,2	13,2 - 22,2	76,6	71,3 - 81,1	508
Penajam Paser Utara	10,1	6,3 - 15,8	21,9	17,5 - 27,0	68,0	61,1 - 74,2	417
Mahakam Ulu	4,9	3,0 - 8,0	18,3	13,8 - 24,0	76,7	70,5 - 82,0	350
Kota Balikpapan	4,6	2,8 - 7,3	20,2	16,5 - 24,3	75,3	71,5 - 78,6	645
Kota Samarinda	5,1	3,1 - 8,2	15,2	11,2 - 20,2	79,7	74,9 - 83,9	448
Kota Bontang	4,2	2,7 - 6,4	16,5	13,5 - 20,0	79,3	75,5 - 82,6	552

Gambar 2.26 Prevalensi Status Gizi (TB/U) pada Balita Prov. Kaltim Menurut Kab/Kota

(Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, Kemenkes- 2025)

Target indikator makro untuk pembangunan Kota Bontang akan tumbuh dengan positif, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya stabilitas makro berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh semua, atau yang termasuk dalam ekonomi yang inklusif. Hingga Triwulan I Tahun 2025, hasil indikator makro pembangunan Kota Bontang menunjukkan kinerja terkait kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada pemerataan dan kesejahteraan ekonomi. Ini digambarkan melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini. Penekanan pada kesejahteraan sosial diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, sektor Pelayanan Umum termuat dalam indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil dari indikator makro ini disajikan dalam tabel di bawah ini:



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel 2.18 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kota Bontang Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target RKPD 2025	Realisasi Triwulan I 2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82	82,49*
2.	Angka Kemiskinan	Persen	3,8	3,74*
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	73,35	7,06*
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,5-3,5	-2,5*
5.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	347,76	366,46
6.	Indeks Gini	Indeks	0,291	0,330

(Sumber: BPS Kota Bontang, RKPD Perubahan Kota Bontang 2025)

*) Data realisasi tahun 2024

Seiring dengan adanya penetapan Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029, maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Bontang tahun 2025-2029, yaitu: **"TERWUJUDNYA KOTA BONTANG SEBAGAI KOTA INDUSTRI DAN JASA YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI DAERAH MITRA IKN"**. Perwujudan visi Kota Bontang Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan rangkaian kinerja yang merefleksikan kondisi tercapainya visi selama 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran pembangunan merupakan rangkaian kinerja spesifik dari hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Visi Kota Bontang difokuskan pada 3 (tiga) tujuan makro pembangunan yaitu: maju, sejahtera dan berkelanjutan serta didukung oleh penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Perwujudan Kota Bontang Sebagai Kota Industri dan Jasa yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai Mitra IKN, ditandai dengan kinerja di bidang ekonomi, sosial dan pembangunan sumber daya manusia, serta peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup. Sementara itu, untuk perwujudan tata kelola pemerintahan merupakan pendukung bagi terwujudnya semua tujuan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan Visi pembangunan Kota Bontang tahun 2025 -2029, maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan Kota Bontang, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Dinamis dan Inklusif
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Memperkuat Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan
5. Meningkatkan Pelestarian Lingkungan Hidup



Dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan di Kota Bontang, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025. Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, Perubahan KUA juga bertujuan untuk menetapkan target kinerja yang lebih baik dan memastikan bahwa program-program pembangunan dapat terlaksana tepat sasaran dan lebih terarah sesuai kebijakan prioritas Kepala Daerah. Proses penyusunan Perubahan KUA di Kota Bontang melibatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Sebagai upaya percepatan pembangunan Kota Bontang Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan dalam perubahan KUA Tahun 2025 dengan berpedoman pada visi, misi dan program prioritas/unggulan Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Akhir RPJMD Kota Bontang tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan dan sasaran daerah masih mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2025.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran memerlukan dukungan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Semakin besar kapasitas keuangan daerah, maka sesungguhnya akan semakin banyak pilihan prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan yang diemban. Namun demikian, perencanaan pembangunan daerah pada umumnya selalu dihadapkan pada situasi dimana kebutuhan pembangunan melampaui kemampuan keuangan daerah yang dapat dihimpun. Oleh sebab itulah diperlukan penyusunan perencanaan pembangunan agar kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.



2.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Nasional

Analisis APBN 2025 menunjukkan kinerja fiskal yang cukup stabil meski menghadapi beberapa tantangan. Hingga semester I-2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.210,1 triliun atau 40,3% dari target APBN sebesar Rp3.005,1 triliun, dengan proyeksi akhir tahun diperkirakan mencapai Rp2.865,5 triliun (95,4% dari target). Penerimaan perpajakan menunjukkan performa yang solid dengan capaian 95,8% dari target, terutama didorong oleh kinerja kepabeanan dan cukai yang melampaui ekspektasi sebesar 102,9%. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih di bawah target (92,9%) akibat realisasi sektor energi dan BUMN yang belum optimal, meskipun penerimaan hibah justru melampaui target sebesar 170,7% berkat bantuan internasional untuk program khusus.

Di sisi belanja negara, realisasi semester I mencapai Rp1.407,1 triliun (38,9% dari target Rp3.621,3 triliun), dengan outlook akhir tahun diproyeksikan sebesar Rp3.527,5 triliun (97,4% dari target). Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) diperkirakan melampaui anggaran (109,9%) karena percepatan proyek infrastruktur dan penyerapan dana untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Namun, belanja non-K/L justru lebih rendah dari target (90%), terutama pada alokasi subsidi energi yang dikurangi seiring stabilnya harga komoditas. Sementara itu, transfer ke daerah menunjukkan penyerapan yang cukup efisien dengan capaian 93,9% dari target.

Defisit APBN 2025 diproyeksikan melebihi target awal. Dari rencana awal sebesar Rp616,2 triliun (-2,53% PDB), outlook defisit meningkat menjadi Rp662 triliun (-2,78% PDB) atau 7,4% lebih tinggi dari target, terutama akibat belanja K/L yang lebih besar dari perkiraan. Keseimbangan primer juga menunjukkan defisit sebesar Rp109,8 triliun (173,4% dari target), menandakan beban pembayaran utang yang semakin besar. Untuk menutup defisit ini, pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp662 triliun (107,4% dari target) melalui skema utang domestik dan hibah luar negeri.

Tantangan utama ke depan adalah menjaga stabilitas fiskal. Peningkatan belanja K/L menunjukkan fiskal yang cenderung ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi hal ini perlu diimbangi dengan optimalisasi PNBP agar defisit tidak semakin melebar. Selain itu, rasio utang diperkirakan mendekati 40% PDB, sehingga perlu penguatan pendapatan negara dan efisiensi belanja. Reformasi subsidi energi juga perlu dipercepat agar dana dapat dialihkan ke program-program yang lebih produktif. Dengan pengelolaan yang hati-hati, pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan tetap stabil di kisaran 5,1-5,3%, didukung oleh penyerapan anggaran yang tepat sasaran dan inflasi yang terkendali di sekitar 3%.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Uraian	APBN 2025 (Rp triliun)	Realisasi semester I-2025 (Rp triliun)	Outlook (Triliun Rp)	% thd APBN
Pendapatan Negara	3005,1	1210,1	2865,5	95,4
I. Penerimaan Perpajakan	2490,9	985,3	2387,3	95,8
1. Penerimaan Pajak	2189,3	837,8	2076,9	94,9
2. Kepabeanan & Cukai	301,6	147,5	310,4	102,9
II. Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP	513,6	224,2	477,2	92,9
III. Penerimaan Hibah	0,6	0,5	1	170,7
Belanja Negara	3621,3	1407,1	3527,5	97,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	2701,4	1006,5	2663,4	98,6
1. Belanja K/L	1160,1	475	1275,6	109,9
2. Belanja non-K/L	1541,4	531,5	1387,8	90
II. Transfer Ke Daerah	919,9	400,6	864,1	93,9
Keseimbangan Primer	-63,3	59,2	-109,8	173,4
Surplus/ (Defisit)	-616,2	-197	-662	107,4
% PDB	-2,53	-0,81	-2,78	
Pembiayaan Anggaran	616,2	283,5	662	107,4

Gambar 2.27 Outlook APBN 2025

(Sumber: Kementerian Keuangan 2025)

2.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2025 menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai provinsi yang sedang mengalami transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sektor migas menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan berkelanjutan, kebijakan fiskal Kaltim tahun 2025 dirancang untuk mendukung tiga pilar utama: (1) transformasi ekonomi, (2) pemerataan pembangunan, dan (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2024 tren realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 21,26 persen. Peningkatan tren realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah yang signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2023 akibat meningkatnya pendapatan pada seluruh komponen pendapatan. Proyeksi pendapatan tahun 2025 juga diperhitungkan akan mengalami peningkatan dengan sebesar 0,5 persen dengan peningkatan pada komponen PAD yang meningkat sebesar 2,31 persen dan Lain lain pendapatan daerah yang sah yang meningkat sebesar 23,11 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, peningkatan target pendapatan daerah tahun 2024 dipengaruhi oleh komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,08 persen, pendapatan transfer sebesar 1,85 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 426,09 persen. Peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sangat signifikan dipengaruhi oleh perolehan pendapatan dari keuntungan Perusahaan Pertambangan Batubara (Izin Usaha Pertambangan Khusus).



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar 0,5 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,32 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat sebesar 23,11 persen. Sedangkan Pendapatan Transfer diproyeksikan menurun pada seluruh komponen pendapatan sebesar 2,92 persen. Secara proporsi pada Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 49,94 persen.

Tabel 2.19 Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026

URAIAN	APBD 2025		Proyeksi 2026
	Rp	%	
Pendapatan Daerah	20.100.000.000.000	100%	21.300.000.000.000
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	10.035.157.739.563	49,93%	11.235.000.000.000
Pendapatan Transfer	9.862.791.865.296	49,07%	10.036.927.064.173
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	202.050.395.141	1,01%	28.072.935.828

(Sumber: RKPD Prov. Kaltim 2025)

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kebijakan keuangan yang berfokus pada transformasi ekonomi pasca-migas, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan ini diwujudkan melalui beberapa program prioritas, antara lain diversifikasi ekonomi dengan pengembangan industri hijau seperti biodiesel dan energi terbarukan, serta penguatan sektor pariwisata di Destinasi Super Prioritas seperti Derawan dan Labuan Cermin. Selain itu, pembangunan infrastruktur penghubung, termasuk penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung smart city di Samarinda dan Balikpapan menjadi fokus utama. Di bidang sumber daya manusia, pemerintah mengalokasikan dana untuk program beasiswa dan pembangunan fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Provinsi baru di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hingga semester I-2025, realisasi anggaran menunjukkan progres yang menggembirakan. Sektor infrastruktur telah menyerap Rp1,34 triliun (32% dari pagu), disusul pendidikan dengan Rp1,17 triliun (28%), kesehatan Rp756 miliar (18%), dan pengembangan ekonomi Rp504 miliar (12%). Tren penyerapan anggaran terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan proyeksi akhir tahun mencapai 90% dari total APBD. Namun, beberapa tantangan masih menghadang, seperti ketergantungan pada pendapatan sumber daya alam (62% PAD), kesenjangan penyerapan antara wilayah perkotaan (85%) dan pedesaan (52%), serta keterlambatan proyek strategis akibat gangguan rantai pasokan.

Untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah, pemerintah provinsi merekomendasikan percepatan diversifikasi pendapatan, peningkatan kapasitas



penyerapan di daerah tertinggal, serta optimalisasi kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema KPBU. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,8-6,2% dan penciptaan 120.000 lapangan kerja, Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Kota Bontang

Kebijakan perubahan pendapatan daerah dikarenakan adanya Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025, dimana perubahan dilakukan dengan membandingkan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025. Berdasarkan ini, maka pendapatan daerah diperlukan penyesuaian dari proyeksi sebelumnya. Perubahan pendapatan daerah dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik 4,98 persen atau sebesar Rp137.153.519.744,00 dari semula sebesar Rp2.756.151.781.025,00 menjadi Rp2.893.305.300.769,00. Perubahan PAD dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik 0,70 persen atau sebesar Rp2.690.507.651,00 dari semula sebesar Rp382.140.309.374,00 menjadi Rp384.830.817.025,00. Pajak daerah meningkat sebesar 0,68 persen atau sebesar Rp1.500.000.000,00. Retribusi daerah diproyeksikan turun 9,48 persen atau sebesar Rp13.209.221.194,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan sedangkan untuk lain – lain PAD yang sah naik sebesar 84,13 persen atau sebesar Rp14.399.728.845,00.

Perubahan pendapatan transfer dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik 5,65 persen atau sebesar Rp106.800.969.000,00 dari semula Rp1.890.559.448.000,00 menjadi Rp1.997.360.417.000,00. Kenaikan ini dikarenakan adanya penarikan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang bersumber dari DBH Pajak dan DBH SDA serta penurunan DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer antar Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan 6,70 persen atau sebesar Rp30.320.068.000,00 dari semula Rp452.710.546.195,00 menjadi sebesar Rp483.030.614.195,00. Kenaikan ini dari kurang salur pendapatan bagi hasil pajak propinsi yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/0419-V/BPKAD tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Propinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2024.

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini realisasi pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa dari APBD sebesar Rp. 3.022.311.609.235,00 terealisasi sebesar Rp.392.398.723.637,00 atau 12,98%. Meskipun penyerapan anggaran masih tergolong rendah, progres pelaksanaan kegiatan dan output dari program-



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

program pemerintah daerah relatif lebih cepat dibandingkan realisasi keuangannya. Jika dilihat dari capaian kinerja telah mencapai sebesar 19,73%.

Beberapa Perangkat menunjukkan performa yang beragam, di mana Dinas Kesehatan menjadi sektor dengan realisasi tertinggi (34,71%), disusul oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (23,83%) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (23,42%). Sementara itu, beberapa dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (1,37%), Dinas Komunikasi dan Informatika (6,49%), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (5,24%) masih menghadapi kendala dalam penyerapan anggaran.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa rata-rata realisasi triwulan I masih di bawah target ideal 25%, dengan kesenjangan yang signifikan antara pagu RPJMD dan realisasi APBD. Kondisi ini mengindikasikan perlunya percepatan penyerapan anggaran, khususnya di sektor infrastruktur dan pembangunan fisik, serta peningkatan koordinasi antardinas. Beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara lain penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah, dan penerapan sistem pemantauan *real-time* untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan upaya tersebut, diharapkan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya dapat lebih optimal dan sesuai dengan target pembangunan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Kota Bontang menggunakan postur anggaran defisit. Dalam hal APBD mengalami defisit tersebut, pemenuhannya dibiayai melalui pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Melalui berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi, ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan akan bertahan pada kisaran 5,20 persen di tengah dinamika global. Dari sisi eksternal yang menghadapi tantangan risiko perang dagang secara langsung, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh.

Pada awal tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai dinamika, seperti melambatnya pengeluaran masyarakat; meningkatnya risiko pengangguran akibat penutupan perusahaan padat karya; serta penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, melemahnya permintaan global, serta disrupsi rantai pasok Tiongkok. Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian global dan domestik serta kebijakan pendorong perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,20 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, GNI per kapita Indonesia diharapkan meningkat ke level US\$5.230. Peningkatan pertumbuhan dari *baseline* dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi.

3.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat serta kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong akselerasi transformasi ekonomi nasional. Tingkat inflasi yang terjaga diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, belanja pemerintah yang bersifat operasional maupun investasi (belanja modal) secara langsung mendukung permintaan domestik, dan secara tak langsung, melalui efek multiplier, akan mendorong aktivitas sektor swasta. Untuk itu, alokasi belanja negara diarahkan pada program-program yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan serta memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan terciptanya kepastian pasca periode Pemilu baik secara global maupun nasional. Masih relatif kuatnya konsumsi domestik, keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, dan berbagai langkah penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim berusaha dan investasi serta daya saing, akan menjadi faktor krusial mendorong kinerja investasi di tahun 2025. Di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan masih relatif stagnan, berbagai upaya Pemerintah untuk mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor, termasuk



pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi Neraca Pembayaran Indonesia. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp15.900 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada *yield* SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga *yield* SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, *yield* SBN lebih rendah dan cenderung memiliki *spread* tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang *prudent* diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga *yield* SBN di kisaran 6,9-7,2 persen pada tahun 2025.

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi *supply*, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi *demand*, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, *lifting* gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 605 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 - 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023 - 2025

INDOKATOR	2023 REALISASI	2024 REALISASI	2025 APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%;yoy)	5,05	5,2	5,2
Inflasi (%;yoy)	2,61	2,8	2,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,88	6,7	7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	82
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	605
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.005

Sumber: KEM PPKF Tahun 2025 dan 2026 (diolah)

3.1.2. Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel 3.2 Postur Makro Fiskal, 2023 – 2025 (dalam % PDB)

U R A I A N	2023 REALISASI (<i>unaudited</i>)	2024 APBN	2025 APBN
A. Pendapatan Negara & Hibah	13,32	12,27	12,36
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	9,91 – 10,18	10,24
2. PNBPN	2,93	1,90 – 2,18	2,11
3. Hibah	0,081	0,010 – 0,020	0,002
B. Belanja Negara	14,94	14,56	14,89
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	11,11
2. Transfer Daerah	4,22	3,76	3,78
C. Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,26)
D. Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,53)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	2,53
2. Rasio Utang	38,98	38,26	39,43

Sumber: KEM PPKF Tahun 2025 dan 2026 (diolah)

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi. Sedangkan upaya penguatan *spending better* dilakukan dengan fokus pada area prioritas yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi penguatan *well-being*, percepatan konvergensi daerah, efisiensi belanja nonprioritas, serta sinergisitas dan harmonisasi pusat – daerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur ICT, energi, konektivitas dan kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN, dan *blended finance*, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Bontang Tahun 2025

Target indikator makro untuk pembangunan Kota Bontang akan tumbuh dengan positif, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya stabilitas makro berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh semua, atau yang termasuk dalam ekonomi yang inklusif. Hingga Triwulan I Tahun 2025, hasil indikator makro pembangunan Kota Bontang menunjukkan kinerja terkait kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada pemerataan dan kesejahteraan ekonomi. Ini digambarkan melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini. Penekanan pada kesejahteraan sosial diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, sektor Pelayanan Umum termuat dalam indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil dari indikator makro ini disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kota Bontang Triwulan I Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target RKPD 2025	Realisasi Triwulan I 2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82	82,49*
2.	Angka Kemiskinan	Persen	3,8	3,74*
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	73,35	7,06*
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,5-3,5	-2,5*
5.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	347,76	366,46
6.	Indeks Gini	Indeks	0,291	0,330

Sumber: BPS Kota Bontang, Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025

Secara umum, faktor-faktor yang dominan dirasakan perangkat daerah dalam mendorong keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi target kinerja Renstra/Renja agar bersifat terukur secara kuantitatif, sehingga memudahkan dalam menghitung capaian kinerja;
2. Telah diterapkannya SIPD sehingga memungkinkan efektivitas dan konsistensi perumusan kebijakan pemerintah daerah;
3. Kualitas SDM yang memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
4. Kota Bontang sebagai kota kecil memiliki fasilitas perkotaan relatif lengkap, sehingga memudahkan mobilisasi maupun distribusi barang dan jasa. Hal ini sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Anggaran yang disahkan di awal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat;



6. Terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan tersebut;
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
8. Dukungan pembiayaan program dan kegiatan dari Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan sangat membantu percepatan pencapaian target kinerja, khususnya pada prioritas pengendalian banjir/genangan air.

Secara umum, faktor-faktor yang dominan di perangkat daerah dalam menghambat pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang berdampak pada anggaran, termasuk di dalamnya kondisi terjadinya pergeseran anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan realisasi;
2. Masih relatif lambatnya proses-proses pengadaan barang dan jasa, khususnya bagi sejumlah kegiatan strategis dan prioritas berdampak pada rendahnya realisasi kinerja dan keuangannya;
3. Perubahan peraturan perundangan di tingkat pusat yang perlu dilakukan penyesuaian;
4. Beberapa perangkat daerah masih kurang optimal dalam penyediaan data, terlebih terkait data indikator kinerja;
5. Kurang maksimalnya penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di masing-masing Perangkat Daerah;
6. Terbatasnya jumlah SDM aparatur yang memiliki komitmen, kapasitas, kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan;
7. Lemahnya sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang tidak dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewasaan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan; dan
8. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja yang kurang tepat waktu.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap setiap tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang hingga Triwulan I tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa program telah mulai berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi masukan dalam menentukan kebijakan untuk Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2025

3.2.2. Kebijakan Makro Fiskal Kota Bontang Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan diperlukan kebijakan makro fiskal suatu daerah. kebijakan ini yang menjadi instrumen penting untuk mendesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah dapat meningkatkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi motivasi pemerintah daerah untuk efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen kebijakan



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

fiskal daerah yang berdampak pada pencapaian target-target dari pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pada tahun 2025, perubahan signifikan terjadi dalam pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp 50,6 triliun, dengan pemangkasan terbesar pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 18,3 triliun. Atas hal tersebut, Pemerintah Kota Bontang melakukan efisiensi terkait belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Hal ini akan sangat memengaruhi postur belanja operasi dalam Perubahan APBD Kota Bontang.

Dengan adanya peningkatan target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025, maka memberikan ruang untuk peningkatan alokasi terhadap belanja pembangunan yang belum diakomodir dalam APBD murni tahun 2025, termasuk dalam rangka belanja daerah untuk peningkatan kinerja program-program prioritas dalam upaya pencapaian target RPJMD pada tahun 2025 dan pelaksanaan program Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Penyesuaian belanja daerah dalam perubahan KUA tahun 2025 disusun dan direncanakan dengan prioritas kebijakan Sebagai upaya percepatan pembangunan Kota Bontang Tahun 2025.

Adapun arah kebijakan makro fiskal Kota Bontang Tahun 2025 sebagai berikut:



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel 3.4. Kebijakan Makro Fiskal Kota Bontang Tahun 2025 (dalam milyar rupiah)

URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	APBD TAHUN 2025	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2025
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN DAERAH	2.448.306.492.422,68	2.817.668.394.556,87	2.756.151.781.025,00	2.893.305.300.769,00
Pendapatan Asli Daerah	264.421.428.875,68	329.657.276.443,99	382.140.309.374,00	384.830.817.025,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.175.130.370.652,00	2.412.503.986.437,00	2.343.269.994.195,00	2.480.391.031.195,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.754.692.895,00	75.507.131.675,88	30.741.477.456,00	28.083.452.549,00
BELANJA DAERAH	2.214.458.110.841,32	3.117.029.950.793,71	3.022.311.609.235,00	3.175.462.818.666,26
Belanja Operasi	1.551.892.075.448,32	2.064.462.920.368,71	2.037.533.071.234,00	1.926.544.342.471,43
Belanja Modal	661.033.963.537,00	1.051.965.132.367,00	978.278.538.001,00	1.242.393.516.994,83
Belanja Tidak Terduga	1.532.071.856,00	601.898.058,00	6.500.000.000,00	6.524.959.200,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH	371.412.531.480,00	581.519.074.134,10	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26
Penerimaan Pembiayaan	396.412.531.480,00	606.519.074.134,10	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26
Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	371.412.531.480,00	581.519.074.134,10	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2023-2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 (diolah)



BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

1.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksi untuk Tahun 2025

Kebijakan perubahan pendapatan daerah dikarenakan adanya Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025, dimana perubahan dilakukan dengan membandingkan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025. Berdasarkan ini, maka pendapatan daerah diperlukan penyesuaian dari proyeksi sebelumnya. Secara umum perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang diproyeksikan pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENDAPATAN DAERAH				
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	382.140.309.374,00	384.830.817.025,00	2.690.507.651,00	0,70%
Pendapatan Transfer	2.343.269.994.195,00	2.480.391.031.195,00	137.121.037.000,00	5,85%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30.741.477.456,00	28.083.452.549,00	-2.658.024.907,00	-8,65%
Jumlah Pendapatan Daerah	2.756.151.781.025,00	2.893.305.300.769,00	137.153.519.744,00	4,98%

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 (diolah)

Perubahan pendapatan daerah dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik 4,98 persen atau sebesar Rp137.153.519.744,00 dari semula sebesar Rp2.756.151.781.025,00 menjadi Rp2.893.305.300.769,00.

1.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

4.1.1. Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah

Memperhatikan kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Kota Bontang Tahun 2025 dengan dasar perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025, maka perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang Tahun 2025 secara rinci sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Perubahan PAD Kota Bontang Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	382.140.309.374,00	384.830.817.025,00	2.690.507.651,00	0,70%
Pajak Daerah	220.009.159.000,00	221.509.159.000,00	1.500.000.000,00	0,68%
Retribusi Daerah	139.336.794.194,00	126.127.573.000,00	-13.209.221.194,00	-9,48%



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.678.822.425,00	5.678.822.425,00	0,00	0,00%
Lain-lain PAD yang Sah	17.115.533.755,00	31.515.262.600,00	14.399.728.845,00	84,13%

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 (diolah)

Perubahan PAD dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik 0,70 persen atau sebesar Rp2.690.507.651,00 dari semula sebesar Rp382.140.309.374,00 menjadi Rp384.830.817.025,00. Pajak daerah meningkat sebesar 0,68 persen atau sebesar Rp1.500.000.000,00. Retribusi daerah diproyeksikan turun 9,48 persen atau sebesar Rp13.209.221.194,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan sedangkan untuk lain – lain PAD yang sah naik sebesar 84,13 persen atau sebesar Rp14.399.728.845,00.

4.1.2. Perubahan Target Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya sdengan memperhatikan kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Kota Bontang tahun 2025, maka perubahan target pendapatan transfer di tahun 2025 atas dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2025 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perubahan Pendapatan Transfer Kota Bontang Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENDAPATAN TRANSFER	2.343.269.994.195,00	2.480.391.031.195,00	137.121.037.000,00	5,85%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.890.559.448.000,00	1.997.360.417.000,00	106.800.969.000,00	5,65%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	452.710.546.195,00	483.030.614.195,00	30.320.068.000,00	6,70%

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 (diolah)

Perubahan pendapatan transfer dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 dengan nilai yang diproyeksikan akan naik 5,65 persen atau sebesar Rp106.800.969.000,00 dari semula Rp1.890.559.448.000,00 menjadi Rp1.997.360.417.000,00. Kenaikan ini dikarenakan adanya penarikan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang bersumber dari DBH Pajak dan DBH SDA serta penurunan DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer antar Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan 6,70 persen atau sebesar Rp30.320.068.000,00 dari semula Rp452.710.546.195,00 menjadi sebesar Rp483.030.614.195,00. Kenaikan ini dari kurang salur pendapatan bagi hasil pajak propinsi yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/0419-V/BPKAD tentang Penetapan Nilai Kurang Salur Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Propinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2024.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

4.1.3. Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Kota Bontang Tahun 2025, maka perubahan target lain-lain pendapatan daerah yang sah atas dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Bontang yang Ditarget Pada Tahun 2025**

URAIAN	APBD TA. 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.741.477.456,00	28.083.452.549,00	-2.658.024.907,00	-8,65%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.741.477.456,00	28.083.452.549,00	-2.658.024.907,00	-8,65%

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 (diolah)

Perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dilihat dari APBD TA. 2025 yang turun sebesar Rp2.658.024.907,00 dari nilai sebelumnya sebesar Rp30.741.477.456,00 atau turun sebesar 8,65% dibandingkan dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025. Perubahan ini dikarenakan adanya penyesuaian rekening pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Adapun penyajian data realisasi anggaran tahun 2023–2024, dan atas dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2025 untuk melihat perubahan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025 secara lengkap sebagai berikut:



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel 4.5 Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2023–2025 (dalam rupiah)

NOMOR KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	APBD TAHUN 2025	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2025 APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.448.306.492.422,68	2.817.668.394.556,87	2.756.151.781.025,00	2.893.305.300.769,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	264.421.428.875,68	329.657.276.443,99	382.140.309.374,00	384.830.817.025,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	118.218.692.064,81	150.018.177.986,95	220.009.159.000,00	221.509.159.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	2.961.878.370,00	107.833.253.435,03	139.336.794.194,00	126.127.573.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.487.431.779,72	4.137.180.321,93	5.678.822.425,00	5.678.822.425,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	139.753.426.661,15	67.668.664.700,08	17.115.533.755,00	31.515.262.600,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.175.130.370.652,00	2.412.503.986.437,00	2.343.269.994.195,00	2.480.391.031.195,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.857.072.687.433,00	2.051.183.904.273,00	1.890.559.448.000,00	1.997.360.417.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	318.057.683.219,00	361.320.082.164,00	452.710.546.195,00	483.030.614.195,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.754.692.895,00	75.507.131.675,88	30.741.477.456,00	28.083.452.549,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.754.692.895,00	2.296.338.156,60	0,00	0,00
4.3.03	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.04	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	73.210.793.519,28	30.741.477.456,00	28.083.452.549,00

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2023-2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 (diolah)



BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah menggambarkan nilai anggaran untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang disesuaikan dengan besarnya pendapatan daerah yang diperoleh. Dengan adanya perubahan dari pendapatan daerah, maka nilai belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari perubahan tersebut. Perubahan ini dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025. Secara umum kebijakan perencanaan perubahan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Perubahan Belanja Daerah Kota Bontang yang Ditarget Pada Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
BELANJA DAERAH				
Belanja Operasi	2.037.533.071.234,00	1.926.544.342.471,43	-110.988.728.762,57	-5,45%
Belanja Modal	978.278.538.001,00	1.242.393.516.994,83	264.114.978.993,83	27,00%
Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	6.524.959.200,00	24.959.200,00	0,38%
Jumlah Belanja	3.022.311.609.235,00	3.175.462.818.666,26	153.151.209.431,26	5,07%

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 (diolah)

Perubahan belanja daerah dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025. Perubahan belanja daerah Kota Bontang tahun 2025 diproyeksikan Rp3.175.462.818.666,26 naik sebesar Rp153.151.209.431,26 atau 5,07 persen dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp3.022.311.609.235,00.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

5.1.1. Rencana Perubahan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, Belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Berdasarkan Kebijakan perencanaan perubahan Belanja Daerah Kota Bontang dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 untuk anggaran perubahan belanja operasi di tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.2. Perubahan Belanja Operasi Kota Bontang Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
BELANJA OPERASI	2.037.533.071.234,00	1.926.544.342.471,43	-110.988.728.762,57	-5,45%
Belanja Pegawai	863.792.737.789,00	805.099.430.788,77	-58.693.307.000,23	-6,79%



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Belanja Barang dan Jasa	1.087.489.904.710,00	1.039.313.734.008,96	-48.176.170.701,04	-4,43%
Belanja Hibah	81.238.253.469,00	75.120.768.407,70	-6.117.485.061,30	-7,53%
Belanja Bantuan Sosial	5.012.175.266,00	7.010.409.266,00	1.998.234.000,00	39,87%

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 (diolah)

Perubahan Belanja Operasi tahun 2025 berdasarkan perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp1.926.544.342.471,43 atau turun sebesar Rp110.988.728.762,57 (5,45 persen) dari nilai sebelumnya sebesar Rp2.037.533.071.234,00.

5.1.2. Rencana Perubahan Belanja Modal

Kebijakan perencanaan perubahan belanja daerah Kota Bontang dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 untuk perubahan belanja modal di tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.3. Perubahan Belanja Modal Kota Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
BELANJA MODAL	978.278.538.001,00	1.242.393.516.994,83	264.114.978.993,83	27,00%
Belanja Modal Tanah	6.652.000.000,00	50.440.418.509,00	43.788.418.509,00	658,27%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.728.763.448,00	219.533.132.857,60	47.804.369.409,60	27,84%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.120.489.298,00	168.673.774.028,00	36.553.284.730,00	27,67%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	661.638.342.519,00	797.541.743.278,23	135.903.400.759,23	20,54%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.734.857.189,00	3.998.788.322,00	263.931.133,00	7,07%
Belanja Modal Aset Lainnya	2.404.085.547,00	2.205.660.000,00	-198.425.547,00	-8,25%

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 (diolah)

Perubahan belanja modal Kota Bontang Tahun 2025 dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 naik sebesar 27 persen atau sebesar Rp264.114.978.993,83 dari pagu sebelumnya sebesar Rp978.278.538.001,00 menjadi Rp1.242.393.516.994,83.

5.1.3. Rencana Perubahan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan perencanaan perubahan belanja daerah Kota Bontang dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 untuk perubahan belanja tidak terduga di tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.4. Perubahan Belanja Tidak Terduga Kota Bontang Tahun 2025

URAIAN	APBD TA. 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
BELANJA TIDAK TERDUGA	6.500.000.000,00	6.524.959.200,00	24.959.200,00	0,38%
Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	6.524.959.200,00	24.959.200,00	0,38%

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 (diolah)

Belanja tidak terduga Kota Bontang Tahun 2025 diproyeksikan naik dari sebesar Rp24.959.200,00 menjadi Rp6.524.959.200,00 atau 0,38 persen.



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Adapun penyajian data realisasi tahun 2023–2024 dan distribusi dengan dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2025 untuk melihat kebijakan perencanaan perubahan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2025 secara lengkap sebagai berikut:



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel 5.5. Realisasi dan Proyeksi P-APBD Tahun 2024 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2023–2025 (dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	APBD TAHUN 2025	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)
BELANJA DAERAH		2.214.458.110.841,32	3.117.029.950.793,71	3.022.311.609.235,00	3.175.462.818.666,26
I. Belanja Operasi		1.551.892.075.448,32	2.064.462.920.368,71	2.037.533.071.234,00	1.926.544.342.471,43
1.	Belanja Pegawai	571.593.451.714,00	709.969.282.885,00	805.099.430.788,77	849.055.505.128,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	867.525.260.190,32	1.257.207.393.171,71	1.039.313.734.008,96	1.036.921.577.999,66
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Hibah	111.127.371.310,00	96.086.644.312,00	81.238.253.469,00	75.120.768.407,70
6.	Belanja Bantuan Sosial	1.645.992.234,00	1.199.600.000,00	5.012.175.266,00	7.010.409.266,00
7.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Belanja Modal		661.033.963.537,00	1.051.965.132.367,00	978.278.538.001,00	1.242.393.516.994,83
1.	Belanja Tanah	1.520.000.000,00	5.263.015.170,00	50.440.418.509,00	50.440.418.509,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	245.818.086.686,00	243.101.129.946,00	219.533.132.857,60	216.963.685.360,60
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	118.003.698.038,00	259.132.176.018,00	168.673.774.028,00	168.673.774.028,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.457.351.037,00	537.738.283.319,00	797.541.743.278,23	752.488.515.869,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.390.143.417,00	5.130.404.098,00	3.998.788.322,00	3.998.788.322,00
6.	Belanja Aset Lainnya	1.844.684.359,00	1.600.123.816,00	2.205.660.000,00	2.112.420.000,00
III. Belanja Tidak Terduga		1.532.071.856,00	601.898.058,00	6.500.000.000,00	6.524.959.200,00
	Belanja Tidak Terduga	1.532.071.856,00	601.898.058,00	6.524.959.200,00	6.524.959.200,00

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2023-2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 (diolah)



BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada:

- 1) Perkiraan anggaran surplus, anggaran dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Perkiraan anggaran defisit, anggaran dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2024;
- 3) Stabilitas keuangan daerah, diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Adapun perubahan pembiayaan daerah Kota Bontang dilihat dari perbandingan APBD dengan Proyeksi P-APBD Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Tahun 2025 (dalam rupiah)

URAIAN	APBD TA. 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26	15.997.689.687,26	6,01%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26	15.997.689.687,26	6,01%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
Pembiayaan Netto	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26	15.997.689.687,26	6,01%

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 (diolah)

Pembiayaan Netto daerah Kota Bontang tahun 2025 mengalami peningkatan 6,01 persen atau Rp15.997.689.687,26 dari semula sebesar Rp266.159.828.210,00 naik menjadi Rp282.157.517.897,26. Berikut secara rinci berkaitan dengan kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2025, meliputi:



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 berkaitan dengan kebijakan penerimaan pembiayaan adalah bersumber pada perkiraan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kota Bontang pada tahun anggaran 2025 diperkirakan berasal dari SiLPA. SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran pada tahun 2024. Adapun perubahan penerimaan pembiayaan berdasarkan perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6.2. Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kota Bontang Tahun 2025 (dalam rupiah)

URAIAN	APBD TA. 2025	Proyeksi P-APBD 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26	15.997.689.687,26	6,01%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26	15.997.689.687,26	6,01%

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 (diolah)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Kota Bontang diproyeksikan pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp282.157.517.897,26. SiLPA tersebut bertambah sebesar Rp15.997.689.687,26 atau 6,01 persen dari semula sebesar Rp266.159.828.210,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan, seperti: embayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan Kota Bontang Tahun 2025 tidak mengalami perubahan sesuai dengan proyeksi sebelumnya.

Adapun penyajian data realisasi pembiayaan daerah tahun 2023-2024 dan dengan dasar perbandingan APBD dengan perubahan APBD tahun 2025 untuk melihat perubahan pembiayaan daerah Kota Bontang tahun 2025 secara lengkap adalah sebagai berikut:



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

**Tabel 6.3 Realisasi, Proyeksi, dan Penetapan Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2023–2025
(dalam rupiah)**

URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	APBD TAHUN 2025	PROYEKSI P-APBD TAHUN 2025
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	396.412.531.480,00	606.519.074.134,10	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	396.412.531.480,00	606.519.074.134,10	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26
Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	371.412.531.480,00	581.519.074.134,10	266.159.828.210,00	282.157.517.897,26
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	605.260.697.136,10	282.157.517.897,26	0,00	0,00

Sumber: LRA Kota Bontang Tahun 2023-2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 (diolah)



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN PERUBAHAN

7.1. Strategi Pencapaian Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA Tahun 2025 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan ini dapat dilihat dari perkembangan kondisi aktual kinerja ekonomi nasional dan daerah dengan memperhatikan proyeksi pendapatan daerah Kota Bontang Tahun 2025 hingga memasuki semester I tahun 2025. Dengan kondisi ini, maka kebijakan perubahan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun strategi pencapaian perubahan pendapatan daerah Kota Bontang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Peningkatan PAD dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan. Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Pengelolaan PAD difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melengkapi seluruh kebutuhan regulasi sebagai dasar kebijakan tata Kelola peningkatan PAD;
- b. Menajamkan dan memperkuat basis data dalam menentukan perhitungan target pendapatan tahunan dengan melakukan kajian potensi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan perhitungan potensi riil secara berkala untuk mengetahui perkembangan potensi riil dari tiap sumber-sumber PAD;
- c. Melaksanakan penguatan pendataan dan validasi data-data objek pajak dan wajib pajak berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi kota dan perekonomian masyarakat;
- d. Melakukan optimalisasi pembayaran pajak/retribusi dan pelaporan pajak/retribusi secara digital dan memanfaatkan teknologi informasi;
- e. Meningkatkan efektivitas upaya penagihan piutang pajak;
- f. Melakukan evaluasi berkala terkait rasio PAD, rasio efektifitas PAD, dan rasio efisiensi PAD sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan Bapenda;
- g. Meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi;
- h. Revitalisasi dan optimalisasi pendayagunaan aset milik pemerintah daerah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi kinerja BUMD sehingga imbal balik keuntungan deviden sebanding dengan besarnya penyertaan modal;



- j. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi wajib pajak;
 - k. Melakukan kajian basis perhitungan penyesuaian tarif pajak sesuai ketentuan regulasi;
 - l. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi melalui peningkatan literasi, sistem punished dan reward;
 - m. Meningkatkan efektivitas evaluasi perencanaan pendapatan dan pencapaian target PAD; dan
 - n. Meningkatkan koordinasi kelembagaan yang sinergis antara Bapenda, Kecamatan dan Kelurahan, OPD Penghasil, Pemerintah Pusat, serta Kejaksaan dan POLRI.
2. Peningkatan Pendapatan Transfer
- Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui penguatan data obyek dan wajib pajak.
- Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer sebagai berikut:
- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU maupun (DAK) dapat lebih optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian DAU dan DAK.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- Upaya dalam mengoptimalkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan
 - b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian lain-lain pendapatan daerah yang sah.

7.2. Strategi Pencapaian Perubahan Belanja Daerah

Perubahan RKPD selaras dengan program prioritas pembangunan daerah dan nasional. Adapun Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 masih dengan tema **“Terwujudnya Kota Bontang Sebagai Kota Industri dan Jasa Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Sebagai Daerah Mitra IKN”**. Perubahan



RKPD ini dalam rangka percepatan pencapaian sasaran utama dengan memperhatikan upaya pencapaian tujuan akhir pembangunan jangka menengah pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Prioritas utama dalam perubahan RKPD diharapkan dapat mendorong terwujudnya indikator kinerja tahun 2025, dimana perubahan ini selaras dengan prioritas pembangunan tingkat provinsi dan nasional. Adapun perubahan RKPD juga akan mengubah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) daerah. Perubahan KUA salah satunya adalah kebijakan perubahan belanja daerah, dimana kebijakan ini diarahkan pada program unggulan dalam prioritas pembangunan daerah.

Perubahan KUA Kota Bontang untuk kebijakan perubahan belanja daerah berfokus pada untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. Adapun permasalahan yang selalu terjadi dalam menentukan kebijakan belanja adalah kebutuhan belanja yang tinggi tidak sepadan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini perlu dilakukan penyeimbangan antar potensi rendahnya pertumbuhan pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja, sehingga belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan dengan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka Pemerintah Kota Bontang menentukan strategi pencapaian perubahan belanja daerah pada tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah mengacu dengan Perubahan RKPD Kota Bontang Tahun 2025 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam mengatur belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer guna mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada perangkat daerah;
- 2) Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
- 3) Pengelolaan belanja daerah untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan Kota Bontang tahun 2025;
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
- 5) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Bontang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 6) Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. seperti pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain



pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

- 7) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada Perubahan RKPD tahun 2025;
- 8) Meningkatkan asas ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas seperti pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak; dan
- 9) Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah.

Selain strategi kebijakan belanja di atas, penyusunan perubahan KUA juga dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA. 2025. Hasil efisiensi telah dialokasikan dan berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

7.3. Strategi Pencapaian Perubahan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan untuk mencapai perubahan target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah semester I Tahun Anggaran 2025. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang dalam mencapai perubahan target pembiayaan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2025, didasarkan pada hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 2) Optimalisasi penggunaan SiLPA untuk pemenuhan belanja prioritas;



PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2025

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan KUA Kota Bontang Tahun 2025, merupakan pedoman pelaksanaan APBD Perubahan tahun anggaran 2025 yang sekaligus merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan KUA Kota Bontang Tahun 2025, memerlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien sesuai dengan strategi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bontang pada matriks tahun ketiga, sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. dengan penjabaran Perubahan KUA Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 disusunlah prioritas dan plafon anggaran perubahan untuk disepakati bersama.

Demikianlah Perubahan KUA Kota Bontang Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bontang, 07 Agustus 2025



Ketua DPRD Kota Bontang

ANDI FAIZAL SOFYAN HASDAM, SH



Wali Kota Bontang,

NI NENI MOERNIAENI, Sp. OG